

RENCANA STRATEGIS

PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 2015-2019 (Revisi II-Review)



Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan

Kementerian Pertanian

Tahun 2016

KATA PENGANTAR

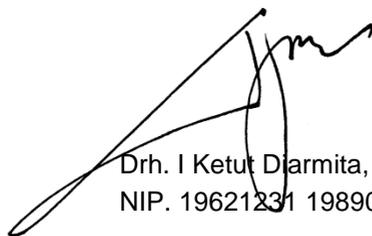
Memasuki periode pembangunan jangka menengah 2015-2019, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, menyusun Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015-2019. Proses penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015-2019 telah dilakukan melalui proses teknokratik, dan telah disesuaikan dengan visi misi dari presiden terpilih Nawacita serta rencana strategis Kementerian Pertanian.

Sesuai amanat UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka perlu dilakukan penataan program dan kegiatan disertai dengan kejelasan sasaran pembangunan, indikator kinerja, dan penanggung-jawab program/kegiatan; penyediaan indikasi kebutuhan pendanaan jangka menengah untuk proyeksi ketersediaan anggaran, dan pematapan proses perencanaan dan penganggaran sehingga terdapat keterkaitan yang erat antara perencanaan dan penganggaran sejak penyusunan RPJMN.

Dengan mempertimbangkan kesesuaian tersebut, serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2015 terkait dengan aspek perencanaan strategis, maka dilakukan review terhadap Rencana Strategis revisi II tahun 2015 – 2019. Rencana Strategis ini telah memuat bagian-bagian yang saling terkait satu sama lain yang menggambarkan proses penyusunannya. Bagian-bagian tersebut adalah: Pendahuluan; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan. Dokumen Rencana Strategis ini juga memuat strategi operasional, pendanaan, dan indikator kinerja untuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan.

Semoga dokumen Rencana Strategis ini bermanfaat bagi aparat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya dan bagi pengguna pada umumnya.

Jakarta, Oktober 2016
Direktur Jenderal,



Drh. I Ketut Darmita, MP
NIP. 19621231 198903 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum.....	2
B. Potensi dan Permasalahan	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	12
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Pertanian	12
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	19
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian.....	19
B. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	21
C. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan	25
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.....	27
A. Program	27
B. Kaitan Antara Indikator Sasaran Strategis Kementan, Sasaran dan Indikator Sasaran Program	28
C. Kegiatan.....	29
BAB V PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN	31
A. Amanat Peraturan Perundangan tentang Kawasan Peternakan	31
B. Ciri Usaha dan Pengembangan Komoditas Peternakan.....	32
C. Kriteria Penentuan Kawasan Peternakan	32

BAB VI PEMBIAYAAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	34
A. Pembiayaan	34
B. Indikator Kinerja	35
BAB VII PENUTUP.....	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Analisa SWOT.....	9
Tabel 1.2. Faktor Lingkungan Internal-Eksternal untuk Analisis Strategi	9
Tabel 1.3. Analisis Lingkungan Strategis untuk Analisis Strategi.....	10
Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementan	12
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	18
Tabel 3.1. Hubungan Protein Hewani dan Harga	22
Tabel 3.2. Konsumsi Susu Perkapita pertahun	23
Tabel 3.3. Volume Ekspor Ternak Babi.....	23
Tabel 3.4. PDB dan Tenaga Kerja Peternakan 2011-2014.....	24
Tabel 6.1. Anggaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan 2016-2019	34
Tabel 6.2. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	37
Tabel 6.3. IKSK Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak.....	38
Tabel 6.4. IKSK Peningkatan Produksi Pakan Ternak	40
Tabel 6.5. IKSK Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan ..	40
Tabel 6.6. IKSK Penjaminan Produk Hewan yang ASUH.....	41
Tabel 6.7. IKSK Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	42
Tabel 6.8. IKSK Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	42
Tabel 6.9. Rincian Target Kerja 2015 -2019.....	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Peta Strategis Kementerian Pertanian dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	13
Gambar 3.1. Kebijakan dan Strategis Pembangunan Pertanian.....	19
Gambar 4.1. <i>Cascading</i> Sasaran Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian.....	28
Gambar 5.1. Kriteria Penentuan Kawasan Peternakan	33
Gambar 6.1. Struktur IKSP dan IKSK.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Sasaran Populasi Sapi Potong Tahun 2015 – 2019	48
Lampiran 2. Sasaran Populasi Sapi Perah Tahun 2015 – 2019	49
Lampiran 3. Sasaran Populasi Kerbau Tahun 2015 – 2019	50
Lampiran 4. Sasaran Populasi Kambing Tahun 2015 – 2019	51
Lampiran 5. Sasaran Populasi Domba Tahun 2015 – 2019	52
Lampiran 6. Sasaran Populasi Babi Tahun 2015 – 2019	53
Lampiran 7. Sasaran Populasi Ayam Buras Tahun 2015 – 2019	54
Lampiran 8. Sasaran Populasi Ayam Petelur Tahun 2015 – 2019	55
Lampiran 9. Sasaran Populasi Ayam Pedaging Tahun 2015 – 2019 ...	56
Lampiran 10. Sasaran Populasi Itik Tahun 2015 – 2019	57
Lampiran 11. Sasaran Produksi Daging Sapi Tahun 2015 – 2019	58
Lampiran 12. Sasaran Produksi Daging Kerbau Tahun 2015 – 2019	59
Lampiran 13. Sasaran Produksi Daging Kambing Tahun 2015 – 2019 ..	60
Lampiran 14. Sasaran Produksi Daging Domba Tahun 2015 – 2019.....	61
Lampiran 15. Sasaran Produksi Daging Babi Tahun 2015 – 2019	62
Lampiran 16. Sasaran Produksi Daging Ayam Buras Tahun 2015–2019	63
Lampiran 17. Sasaran Produksi Daging Ayam Petelur Tahun 2015–2019	64
Lampiran 18. Sasaran Produksi Daging Ayam Pedaging Tahun 2015–2019.	65
Lampiran 19. Sasaran Produksi Daging Itik Tahun 2015 – 2019.....	66
Lampiran 20. Sasaran Produksi Telur Ayam Buras Tahun 2015-2019...	67
Lampiran 21. Sasaran Produksi Telur Ayam Petelur Tahun 2015 – 2019	68
Lampiran 22. Sasaran Produksi Telur Itik Tahun 2015 – 2019.....	69
Lampiran 23. Sasaran Produksi Susu Tahun 2015 – 2019	70

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019 ini disusun dengan memperhatikan secara berjenjang dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Pembangunan Pertanian 2015-2019. Renstra pembangunan pertanian tersebut juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan sebagai salah satu tahap dari Rencana Pembangunan Panjang Nasional (RPJPN). Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, Kementerian Pertanian juga telah menetapkan Rencana Induk Pembangunan Jangka Panjang berupa Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) hingga tahun 2045, sebagai dasar dan landasan pembangunan pertanian termasuk subsektor peternakan dan kesehatan hewan di masa mendatang.

Tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah menyusun kebijakan dibidang produksi ternak dan pengembangan ternak dengan fungsi mencakup kebijakan di bidang perbibitan dan produksi, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Fungsi ini merupakan perubahan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dari yang sebelumnya mencakup perbibitan, pakan, budidaya, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen. Dengan demikian terjadilah fusi dari berbagai fungsi yang mengharuskan perlunya perubahan Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan selama kurun waktu 2015 – 2019. Perubahan Renstra tersebut sesuai pula dengan pendekatan manajemen strategis yang menyebutkan bahwa rencana kebijakan akan berubah terus menyesuaikan dengan perkembangan yang mempengaruhi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan baik internal maupun eksternal.

Maksud dan tujuan penyusunan revisi Renstra agar dapat menjadi arahan dalam mengelola tugas pokok dan fungsi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baru dan selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian yang berisikan terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Penyusunan renstra perubahan ini telah menampung segala saran dan masukan dari pemangku kepentingan.

A. Kondisi Umum

Penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan secara umum dapat dilihat dari dua aspek yaitu kinerja aspek makro ekonomi yang menyangkut pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, investasi (PMA maupun PMDN) perdagangan peternakan dan kesehatan hewan, laju ekspor dan impor dan indikator kesejahteraan peternak. Selain kinerja aspek makro ekonomi, juga dapat dilihat dari kinerja aspek teknis peternakan dan kesehatan hewan yaitu populasi ternak, produksi daging, telur dan susu serta konsumsi masyarakat akan produk ternak tersebut. Aspek teknis ini akan berkaitan dengan fungsi-fungsi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang dicerminkan dari fungsi perbibitan dan produksi, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan serta pemasaran hasil peternakan.

1. Kinerja Ekonomi

Dari kinerja makro ekonomi, menunjukkan bahwa untuk Produk Domestik Bruto (PDB) peternakan selama lima tahun (2010-2015) atas dasar harga konstan telah tumbuh 4,67% per tahun. Pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan, lebih tinggi dari pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti sempit) yang hanya sebesar 4,26%. Pertumbuhan sub sektor peternakan selama kurun waktu 2009-2013 merupakan pertumbuhan tertinggi diantara sub sektor lainnya di lingkup pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sub sektor peternakan berpeluang sebagai sumber pertumbuhan baru sektor pertanian.

Penyerapan tenaga kerja peternakan dan kesehatan hewan dalam kurun waktu 2013-2015 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 telah menyerap 4.691.073 tenaga kerja, tahun 2014 sebesar 4.189.721 tenaga kerja dan tahun 2015 sebesar 3.856.839 tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja peternakan ini merupakan ketiga terbesar sesudah sub sektor perkebunan dan sub sektor tanaman pangan di lingkup sektor pertanian. Rasio penyerapan tenaga kerja sub sektor peternakan terhadap tenaga sektor pertanian adalah 10,94% dan terhadap keseluruhan serapan tenaga kerja adalah sebesar 3,35% pada tahun 2015.

Investasi baik PMDN maupun PMA relatif masih kecil yaitu kurang dari 1% secara nasional kurun waktu 2010-2015. Investasi didominasi oleh sektor perunggasan yaitu untuk PMDN sebesar 78,69% dan PMA sebesar 73,09%. Sedangkan untuk investasi lainnya yaitu peternakan sapi dan kerbau meningkat sebesar 5,6%, peternakan lainnya sebesar 13,19% untuk PMDN dan PMA peternakan sapi dan kerbau sebesar 8,80%, peternakan lainnya sebesar 14,66%.

Indikator keberhasilan kesejahteraan peternak dapat dilihat dari nilai tukar petani peternakan yang selama tahun 2010-2015 mengalami fluktuasi nilai indeks, dengan kecenderungan naik dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Selama tahun tersebut nilai tukar petani peternakan masing-masing sebesar 104,10; 101,22; 101,33; 102,05; 106,65; dan 107,69. Hal ini mencerminkan bahwa kesejahteraan petani peternakan masih belum optimal tetapi nilai tukar petani peternakan tersebut lebih tinggi dari nilai 100 yang berarti indeks harga yang diterima peternak masih lebih besar dari indeks harga yang dibayar peternak.

2. Kinerja Teknis

a. Populasi Ternak

Dalam rentang waktu 5 tahun (2010-2015) pertumbuhan populasi ternak besar rata-rata mengalami kenaikan, kecuali kerbau mengalami penurunan yaitu : sapi potong 4,28%, sapi perah 3,41%, kuda 0,76% dan kerbau (6,54%), sedangkan pertumbuhan populasi ternak kecil meningkat yaitu: kambing 3,43%, domba 12,15%, dan babi 1,14%.

Pertumbuhan populasi ternak unggas dan aneka ternak rata-rata meningkat, masing-masing sebesar: ayam buras 2,67%, ayam ras petelur 10,29%, ayam ras pedaging 11,57%, itik 8,50%, kelinci 25,07%, dan itik manila mencapai 14,84%. Untuk ternak unggas lainnya, seperti kelinci, burung puyuh, dan merpati meningkat signifikan masing-masing sebesar 8,84%; 20,89 dan 54,26%.

b. Produksi Ternak

Dalam kurun waktu 5 tahun produksi daging dan telur nasional meningkat, sedangkan produksi susu turun sebesar 2,65%. Produksi daging nasional meningkat sebesar 5,48% yang berasal dari kontribusi hampir seluruh komoditi, kecuali kambing dan domba yang turun masing-masing sebesar 1,34% dan 0,56%. Sedangkan produksi telur meningkat sebesar 6,21%.

c. Konsumsi

Konsumsi daging, telur dan susu selama kurun waktu 2010-2014 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS-SUSENAS) menunjukkan konsumsi produk peternakan per kapita perminggu untuk daging segar per kapita tahun 2014 sebesar 5,005 kg atau meningkat sebesar 6,65% dari konsumsi tahun 2013 yaitu sebesar 4,693 kg. Konsumsi daging diawetkan perkapita 0.063 kg sama dengan konsumsi tahun 2013. Sedangkan konsumsi daging lainnya yaitu hati, jeroan, sebesar 0,365 kg yang meningkat sebesar 16,67% dibandingkan tahun 2013 yakni sebesar 0,313 kg. Untuk telur ayam ras konsumsi perkapitanya tahun 2014 mencapai 6,309 kg atau meningkat

sebesar 2,54 % dari konsumsi tahun sebelumnya yakni 6,153 kg. Konsumsi telur ayam ras sebesar 2,607 butir yang tidak meningkat atau sama dengan tahun sebelumnya. Untuk konsumsi susu segar 0,156 liter atau mengalami peningkatan 50% dari konsumsi tahun sebelumnya yakni 0,104 liter. Apabila dihitung kalorinya maka konsumsi kalori perkapita perhari untuk daging mencapai 43,33 kkal, telur dan susu 54,94 kkal. Berdasarkan penghitungan konsumsi protein perkapita hari untuk daging sebesar 2,68 gram, telur dan susu sebesar 3,17 gram pada tahun 2014. Adapun tingkat pengeluaran perkapita sebulan untuk makanan sebesar 50,04% dan non makanan sebesar 49,96%. Dari pengeluaran untuk makanan tersebut pengeluaran untuk konsumsi daging sebesar 3,86% dan untuk konsumsi telur dan susu sebesar 6,16%.

3. Kinerja Fungsi

a. Kinerja Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak

Terkait penyusunan NSPK, selama periode lima tahun telah tersusun berbagai peraturan sesuai dengan kewenangannya yaitu 1 Peraturan Pemerintah, 20 Permentan dan 30 Standar Nasional Indonesia. Selain itu, dari aspek teknis telah dilakukan penetapan/pelepasan rumpun/galur yang dituangkan dalam 63 Keputusan Menteri Pertanian serta 12 wilayah sumber bibit ternak di tujuh provinsi pada 11 kabupaten pada dua lokasi yang ditetapkan. Dari uji zuriat telah dihasilkan 15 *provenbull* dan 3 calon *bull* yang akan di-*launching* pada tahun 2017. Sedangkan uji performan telah menghasilkan bibit sapi potong unggul yang terdiri dari 438 ekor bibit sapi Bali, 11 ekor bibit sapi Madura, 97 ekor bibit sapi Peranakan Ongol (PO), 63 ekor bibit sapi Sumba Ongole (SO), dan 34 ekor bibit sapi Aceh. Telah dibangun Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) benih dan bibit ternak sejak tahun 2011 dan saat ini dalam proses akreditasi KAN pada tahun 2015 dengan no. LSPR-045-IDN tanggal 29 Juli 2015. Sampai dengan tahun 2015 LSPro telah menetapkan benih dan bibit bersertifikat terdiri dari sertifikat bibit Sapi Perah sebanyak 175 ekor, Sapi Brahman Indonesia sebanyak 22 ekor, Sapi Bali sebanyak 128 ekor, Kambing PE sebanyak 56 ekor. Sedangkan untuk sertifikat semen beku sebanyak 304 *bull* atau setara 18.260.000 straw dan embrio sebanyak 867 embrio. Jumlah bibit ternak yang telah diberi yang sesuai dengan Standard Nasional Indonesia (SNI) dan telah diterbitkan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) oleh Dinas Provinsi/Kabupaten sebanyak 12.575 ekor.

Kinerja operasional kegiatan perbibitan dan produksi ternak selama lima tahun adalah penguatan kelompok pembibitan ternak ruminansia sapi potong dan kerbau, kambing dan domba, serta ternak non ruminansia

(ayam lokal, puyuh, kelinci dan babi). Untuk kegiatan lainnya adalah penyelamatan sapi kerbau betina produktif (insentif sapi kerbau betina bunting dan penambahan pejantan/indukan sapi potong dan sapi perah), penguatan pembibitan sapi lokal asli di tiga pulau dan penguatan pembibitan sapi potong di kabupaten/kota terpilih dan khusus untuk kerbau dilakukan pembibitan kerbau di tujuh kabupaten/kota terpilih. Lokasi penguatan tersebut masuk ke dalam lokasi SPR sesuai dengan Permentan No. 62/2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016.

Kinerja utama perbibitan ialah tercapainya swasembada semen beku tahun 2012 dan tercapainya swasembada pejantan unggul tahun 2013, namun pada tahun 2017 direncanakan impor *bull* register sebanyak 24 ekor pejantan untuk *replacement* dan variasi genetik. Produksi semen beku Balai Inseminasi Buatan Nasional telah mampu melakukan ekspor ke tujuh negara dan diharapkan dapat dikembangkan ke negara lainnya sehingga menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan negara ke depannya.

Dalam aspek produksi ternak berbagai upaya dan kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tersebut adalah pengembangan usaha budidaya ternak 3.633 kelompok, pembangunan pos IB/ULIB 600 kelompok dan penguatan kelembagaan IB 5.064 Unit. Selanjutnya dalam meningkatkan dalam pelaksanaan IB telah dilakukan peningkatan kapasitas petugas IB 4.225 orang, optimalisasi IB 5.564.374 Dosis, fasilitasi N2 cair 800.610 liter dan kendaraan roda dua petugas IB. Untuk peningkatan kawin alam telah dilakukan pengadaan penyebaran pejantan INKA 12.512 Ekor. Pengembangan budidaya ternak melalui SMD 3.091 Kelompok. Ekspor babi, kambing dan domba, merupakan keberhasilan penting selama kurun waktu lima tahun terakhir.

b. Kinerja Fungsi Pakan Ternak

Kinerja fungsi pakan ternak yang dilaksanakan sejak tahun 2011 antara lain, yaitu: pengembangan integrasi ternak ruminansia dan ternak unggas dibebberapa kelompok dan lokasi. Untuk membantu kecukupan pakan ternak ruminansia telah dikembangkan pengembangan sumber benih/bibit HPT di UPT Pusat dan UPT Daerah yang didistribusikan ke kelompok dalam kegiatan pengembangan sumber benih/bibit HPT. Selain itu, dikembangkan pula padang penggembalaan ternak di 6 (enam) provinsi terutama di provinsi Indonesia Timur yaitu Papua Barat, NTT, NTB, Sulteng, Sultra dan Aceh. Untuk pemanfaatan lahan kehutanan telah dikembangkan HPT dilahan kehutanan pada beberapa kelompok. Selain itu, juga berhasil dilakukan pengembangan dan

penanaman pakan berkualitas dan Pengembangan Unit Pengolahan Bahan Pakan (UBP), pengembang unit pengolah pakan baik untuk ruminansia maupun perunggasan.

Untuk menjaga mutu pakan telah diperkuat laboratorium pakan daerah di 6 lokasi serta pengawasan mutu pakan dan bimbingan teknis di seluruh provinsi. Sedangkan dari aspek regulasi telah dibuat 5 (lima) Peraturan Menteri Pertanian di bidang pakan.

c. Kinerja Fungsi Kesehatan Hewan

Pada aspek kesehatan hewan telah dilakukan berbagai upaya dan kegiatan, yaitu kesiap-siagaan wabah 24.203.896 dosis, penguatan kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan 237 unit, penguatan laboratorium pengujian dan penyidikan veteriner dan penguatan survailant Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ) 344.952 Sampel. Dibidang obat hewan telah ditingkatkan kapasitas produksi obat hewan, peningkatan pengujian mutu obat hewan dan revitalisasi pengawas obat hewan di berbagai daerah sebesar 24.469.659 dosis. Penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi dan kerbau dan penyakit parasiter sebesar 781.741 dosis untuk program swasembada daging sapi telah dikerjakan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Kemandirian vaksin AI yang berasal dari strain virus lokal yang berasal dari *master seed* yang dapat dijadikan vaksin AI sehingga impor vaksin AI dapat dihentikan. Sedangkan regulasi terkait bidang kesehatan hewan mencakup 4 Peraturan Menteri Pertanian dan 3 rancangan Permentan.

Pembebasan dan mempertahankan PHMS yaitu penyakit Brucellosis di pulau Madura dan pulau Sumba, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Rabies di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, DKI, Papua, Papua Barat, NTB, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Hog Cholera di provinsi Sumatera Barat. Ekspor obat hewan terus dijajaki ke 17 negara.

d. Kinerja Fungsi Kesmavet

Upaya dan kegiatan untuk mendukung Kinerja Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah fasilitasi Rumah Potong Hewan (RPH) 134 paket dan pembangunan tempat penampungan unggas 46 paket, penataan kios daging 76 unit di beberapa wilayah penting di Indonesia. Selain itu telah dilakukan pengadaan alat transportasi daging berpendingin 28 unit untuk RPH selain melengkapi jumlah *cold storage* 18 unit. Dibidang persusuan telah dibangun tempat pengumpulan susu di 33 kelompok peternak sapi

perah. Selain itu juga, telah dilakukan pengadaan peralatan kesmavet 88 paket dan peningkatan pelayanan teknis mutu produk hewan 94.972 sampel. Pada aspek sumber daya manusia telah dilakukan pembinaan SDM kesmavet. Terkait regulasi Kesehatan Masyarakat Veteriner telah diterbitkan 1 Peraturan Pemerintah, 12 Peraturan Menteri Pertanian, 3 rancangan Permentan dan 1 Standard Nasional Indonesia serta dua Standart Kompetensi Kerja Nasional. Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk unit usaha pangan asal hewan.

e. Kinerja Fungsi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPH-Nak)

Menurut Permentan 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat PPH-Nak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; (2) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; (3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; (5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; dan (6) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

f. Kinerja Fungsi Kesekretariatan

Dari aspek Kesekretariatan dan Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dilakukan perbaikan penyusunan perencanaan program dan anggaran pada 528 kegiatan, penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan evaluasi program kegiatan serta penyediaan data informasi yang berkualitas 521 monitoring dan evaluasi. Dari aspek kepegawaian organisasi hukum 57 laporan serta administrasi perkantoran telah dibenahi berbagai laporan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan termasuk penyusunan pelaksanaan administrasi keuangan dan asetnya yang makin berkualitas masing-

masing sebesar 57 laporan dan 474 laporan. Pendataan ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau yang merupakan kerjasama dengan BPS dengan metode sensus, pembangunan website Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, penerapan pengembangan kawasan, penerapan ISO dan pelayanan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan.

Keberhasilan-keberhasilan tersebut mendorong indeks penerapan nilai budaya kerja dan indeks kepuasan masyarakat semakin meningkat dengan nilai mutu budaya kerja berklasifikasi baik dan indeks IKM juga meningkat dengan nilai baik. Dari aspek regulasi Peraturan Perundang-Undangan telah diselesaikan 5 Peraturan Pemerintah, satu Peraturan Presiden, 45 Peraturan Menteri Pertanian dan 90 keputusan menteri pertanian. Disamping itu telah dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 menjadi undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

B. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan dilihat dari aspek lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Lingkungan strategis internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Sedangkan pada aspek eksternal pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dipengaruhi ancaman dari luar. Tetapi pada aspek ini memungkinkan terjadinya terjadinya peluang-peluang yang diberikan. Hasil analisis kedua faktor tersebut dianalisis dengan metode SWOT untuk melihat beberapa aspek internal dan eksternal yang penting yang dapat dijadikan strategi. Adapun analisis SWOT tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini :

Tabel 1.1 Analisis SWOT

Aspek Internal	Aspek Eksternal
<p style="text-align: center;">Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kekayaan jenis plasma nuftah b. Tersedianya biomasa pakan c. Kemampuan konservasi lahan d. Tersedianya sumber pakan lokal e. Adanya keswan & kesmavet f. Bebas PMK 	<p style="text-align: center;">Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasar produk peternakan b. Potensi sumber daya & penggerak pertumbuhan ekonomi c. <i>Political will</i> kemitraan d. Kesadaran global (<i>food safety, biosecurity</i>, kesejahteraan hewan, dan kualitas lingkungan) e. Perkembangan teknologi
<p style="text-align: center;">Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelembagaan (efektifitas kemitraan, peran koperasi, dukungan perbankan & asuransi) b. Konsistensi kebijakan dan instrumentasi kebijakan c. Tumpang tindihnya peraturan dalam produksi dan bisnis) d. Ego sektoral e. Kemampuan SDM f. Infrastruktur (kualitas RPH, sarana transportasi) g. <i>Law enforcement, reward dan punishment</i> 	<p style="text-align: center;">Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persaingan dan liberalisasi pasar b. Ketergantungan sarana produksi dari impor c. Perubahan iklim yang berpengaruh pada pengadaan pakan & kesehatan hewan d. Penurunan angkatan kerja di sektor peternakan e. Penyakit eksotik f. Kesepakatan internasional yang tidak menguntungkan (terkait Hak Kekayaan Intelektual/HKI dan <i>animal welfare</i>) g. Persaingan dalam penggunaan lahan dan alih fungsi lahan

Dari identifikasi lingkungan strategis tersebut maka dilakukan re-evaluasi faktor lingkungannya untuk kepentingan analisis strategi. Berdasarkan kajian para pakar dari pihak luar maupun maupun dari dalam maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2. Faktor Lingkungan Internal-Eksternal Strategis untuk Analisis Strategi

Aspek Internal	Aspek Eksternal
<p style="text-align: center;">Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kekayaan jenis b. Biomassa pakan c. Pakan lokal d. Keswan & kesmavet 	<p style="text-align: center;">Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasar produk b. Kesadaran global
<p style="text-align: center;">Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelembagaan (kemitraan, koperasi, perbankan) b. Infrastruktur 	<p style="text-align: center;">Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persaingan dan liberalisasi b. Ketergantungan impor produksi c. Penurunan angkatan kerja d. Penyakit eksotik e. Alih fungsi lahan

Analisis berbagai faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dengan berbagai asumsi skenario pada analisis lingkungan strategis selanjutnya digunakan untuk analisa strategi sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3. Analisis Lingkungan Strategis Untuk Analisis Strategi

Internal Eksternal	<p><u>Kekuatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan jenis 2. Biomassa pakan 3. Pakan lokal 4. Keswan & kesmavet 	<p><u>Kelemahan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan (kemitraan, koperasi, perbankan) 2. Infrastruktur
<p><u>Peluang:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar produk 2. Kesadaran global 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan daya saing melalui pemanfaatan sumber daya lokal ▪ Meningkatkan <i>building capacity</i> ayam buras ▪ Meningkatkan <i>maksimum security</i> ▪ Memetakan lahan dan sentra ternak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Restrukturisasi pasar peternakan ▪ Penguatan kelembagaan usaha peternakan dan keswan ▪ Mengembangkan system investasi
<p><u>Ancaman:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan dan liberalisasi 2. Ketergantungan impor produksi 3. Penurunan angkatan kerja 4. Penyakit eksotik 5. Alih fungsi lahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan peternakan bioindustri berkelanjutan ▪ Pengembangan sistem kesehatan hewan ▪ Pengembangan sistem pendukung biobisnis peternakan ▪ Mendistribusikan ternak dari daerah padat ke daerah pakan berlimpah ▪ Mengembangkan kawasan perbibitan berbasis kepulauan ▪ Mengembangkan sentra ternak dan pakan ternak berbasis tanaman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kawasan ▪ Pengembangan sistem pendukung biobisnis peternakan ▪ Penyusunan transformasi peternakan rakyat ke industri ▪ Penguatan kelembagaan usaha peternakan dan keswan ▪ Memperlancar arus produk peternakan ▪ Memperkuat regulasi untuk kemandirian dan keamanan peternak ▪ Memperkuat infrastruktur peternakan dan keswan ▪ Merevitalisasi kelembagaan usaha menuju koperasi ▪ Memperkuat tataniaga dan pemberian instensif

Dari hasil analisis tersebut dalam Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan program yang baru yang secara umum mencakup perubahan-perubahan pada aspek sumber daya manusia peternakan dan kesehatan hewan infrastruktur dan suprastruktur, sarana prasarana, teknologi dan sistem

informasi, kerangka regulasi dan kelembagaan. Beberapa aspek yang harus dilakukan perubahan ini akan menentukan arah kebijakan dan strategi yang akan dirumuskan pada uraian berikutnya. Perlunya suatu program baru berimplikasi pembiayaan maupun indikator kinerja program dan kegiatan yang akan tercermin dalam arsitektur dan informasi kinerja dengan mempertimbangkan *cascading* sasaran strategis pertanian, program dan kegiatan pada masing-masing level organisasi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Pertanian

Revisi Renstra Kementerian Pertanian meliputi visi, misi, sasaran strategis dan tujuan. Perubahan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kementerian tersebut disampaikan pada tabel berikut :

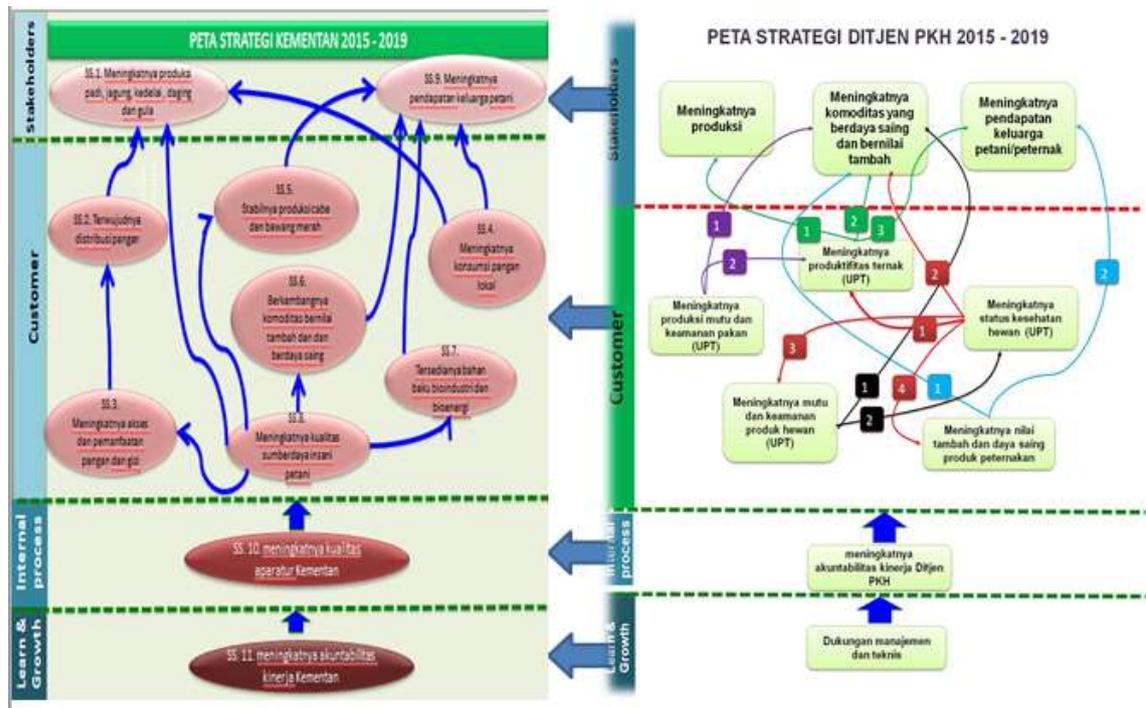
Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Pertanian

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
TERWUJUDNYA KEDAULATAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI	1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi	1. Terwujudnya swasembada padi jagung, kedelai serta meningkatnya produksi daging	1. Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula
		2. Terpenuhinya akses pangan masyarakat	2. Terjaminnya distribusi 3. Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi
		3. Bergesernya budaya konsumsi pangan	4. Meningkatnya konsumsi pangan lokal
		4. Meningkatnya stabilitas produksi dalam rangka stabilisasi harga	5. Stabilitasnya produksi cabe dan bawang merah
	2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	5. Meningkatnya kualitas komoditas pertanian sehingga bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor	6. Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing
		6. Mendorong majunya agrobiindustri	7. Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi
	3. Mewujudkan kesejahteraan petani	7. Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani	8. Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani 9. Meningkatnya pendapatan keluarga petani
		4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel,	8. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan Pertanian tersebut dan menjaga konsistensi pencapaian Sasaran Program maka pembangunan peternakan dan kesehatan hewan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan penyesuaian. Walaupun demikian untuk menyusun revisi Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut terlebih dahulu mengacu pada peta strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 dan *cascading* organisasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu eselon I yang mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian. Dari peta strategi tersebut

dibuatlah keterkaitan dengan peta strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dapat digambarkan pada diagram berikut ini :



Gambar 2.1. Peta Strategis Kementerian Pertanian dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Diagram ini menggunakan pendekatan *balance score card* yaitu : pendekatan yang lebih komprehensif dengan empat perspektif yaitu : *learn & growth*, proses internal, *customer* dan *stakeholder* untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi.

Pendekatan *balance score card* ini dipakai agar lebih objektif dan komprehensif yang mengandung arti bahwa kinerja diukur tidak saja dari segi finansial maupun non finansial karena selama ini kinerja finansial cenderung dinyatakan berhasil jika dapat menyerap 100% anggaran walaupun hasil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan masih berada di bawah standart.

Pada gambar diatas disebelah kiri yaitu pada level *stakeholder* nampak bahwa meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula sebagai sasaran strategis (SS1) dipengaruhi oleh perspektif *customer* yaitu terwujudnya distribusi pangan. Untuk terwujudnya distribusi pangan tersebut tergantung dari meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi (SS3) yang selalu berkaitan dengan stabilnya produksi (SS5). Stabilnya produksi dapat menghasilkan peningkatan pendapatan keluarga petani (SS9) pada perspektif *stakeholder*. Meningkatnya konsumsi pangan lokal (SS4) pada level *customer* mampu menghasilkan pula peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, daging

dan gula (SS1) dan konsumsi pendapatan keluarga petani (SS9) pada level *stakeholder*.

Pada level *learn & growth* serta proses internal didukung oleh meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementan (SS11) untuk meningkatnya kualitas aparaturnya (SS10).

Dari peta strategi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan apabila disandingkan dan telah sesuai dengan strategi Kementerian Pertanian yaitu telah menerapkan pendekatan *balance scorecard* yang melibatkan 4 aspek yaitu aspek pembelajaran dan pertumbuhan, proses internal, pelanggan dan *stakeholder*. Pada gambar di sebelah kanan atas terlihat bahwa kinerja fungsi meningkatnya produktivitas ternak dipengaruhi oleh kinerja fungsi meningkatnya produksi dan mutu pakan, dipengaruhi oleh kinerja fungsi meningkatnya status kesehatan hewan. Kinerja fungsi meningkatnya status kesehatan hewan dipengaruhi oleh kinerja fungsi meningkatnya mutu dan keamanan produk hewan (pada prespektif *customer*). Kinerja fungsi ini akan menyebabkan meningkatnya produksi pangan asal ternak, meningkatnya daya saing peternakan dan meningkatnya kesejahteraan peternak (prespektif *stakeholder*). Dalam prespektif internal proses Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mendukung prespektif *customer* dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan dalam prespektif *learn and growth* mendukung internal proses untuk dukungan manajemen dan teknis. Demikian keempat perspektif ini saling mendukung untuk mencapai tujuan program.

Dari hubungan peta strategi Kementerian Pertanian dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta kondisi lingkungan strategis internal maupun eksternal maka telah dirumuskan visi, misi dan tujuan serta sasaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak

Visi ini menghendaki kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak yaitu komoditas daging, telur dan susu yang berasal dari 11 jenis ternak yaitu: sapi potong, kerbau, sapi perah, kambing, domba, babi, ayam lokal, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, dan aneka ternak. Menurut Undang-Undang Pangan No.18 Tahun 2012, Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah

pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

2. Misi

Untuk mencapai visi terwujudnya kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak tersebut, maka Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai misi:

a. Mewujudkan ketahanan pangan asal ternak;

Ketahanan pangan sesuai UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak;

Nilai tambah dan daya saing diperoleh dari berbagai inovasi dan teknologi yang diterapkan dalam komoditas ternak dan produk ternak sehingga menjadi lebih efisien. Saat ini ternak dan produk ternak masih belum optimal untuk ditingkatkan nilai tambah dan daya saingnya karena inovasi dan teknologi masih rendah terutama ditingkat *off farm*, khususnya dibidang pengolahan dan pemasaran.

c. Mengembangkan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan berkelanjutan;

Usaha yang berkelanjutan di bidang peternakan dan kesehatan hewan berarti dibidang ini harus ramah lingkungan, tidak merusak alam serta mampu menciptakan kelestarian lingkungan hidup yaitu dengan usaha pemanfaatan SDA setempat dan daur ulang limbah peternakan. Dengan demikian bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan usaha yang berkelanjutan dan merupakan *renewable product*.

d. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Misi ini merupakan bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good government*. Untuk ini pada kurun waktu 2015-2019 reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan ikut berperan dalam nawacita.

3. Tujuan

a. Tujuan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015-2019

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, adalah:

1) Meningkatkan produksi ternak;

Peningkatan populasi dilakukan dengan peningkatan kelahiran dan penekanan kematian dan pelayanan kesehatan hewan. Peningkatan produksi daging telur dan susu sebagai dampak dari peningkatan populasi yang akan meningkatkan produksi ternak. Produktivitas ternak diperoleh dengan peningkatan berat badan, produksi karkas, meningkatnya jumlah induk yang bertelur dan induk yang menghasilkan susu dan pencegahan penyakit hewan menular sehingga peningkatan populasi, produksi dan produktivitas merupakan segitiga yang saling tidak terpisahkan.

2) Meningkatkan kualitas komoditas ternak;

Kualitas komoditas ternak diperoleh dengan penyediaan bibit yang baik (*good breeding practices*), budidaya yang baik (*good farming*), penyediaan pakan yang baik (*good feeding practices*), penanganan pengolahan dan pematangan yang baik (*good slaughtering*) dan *good process practices* serta penanganan produk untuk pemasaran hasil ternak (*good marketing practices*). Peningkatan kualitas komoditas ternak ini dimulai dari sejak dari hulu sampai hilir (*from the farm to table*).

3) Meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor;

Karena Indonesia merupakan negara terbesar yang beragama Islam maka produk ternak yang dihasilkan harus Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH). Selain produk yang ASUH maka produk peternakan tersebut sudah mulai harus berorientasi ekspor. Pada kasus perunggasan sudah harus mengalami hilirisasi industrinya dan berorientasi ekspor untuk mencegah terjadinya surplus produk dan gejolak harga di dalam negeri. Demikian juga untuk ternak babi dan kambing domba produksinya harus berorientasi ekspor. Untuk ini proses budidayanya harus menerapkan standar ekspor.

4) Meningkatkan status kesehatan hewan;

Status kesehatan hewan yang diharapkan yaitu bebasnya Indonesia dari berbagai penyakit hewan menular penting, misalnya Anthrak, Jembrana, *Septicaemia Epizootica* (SE), Flu Burung dan lainnya. Saat ini wabah penyakit masih menjadi ancaman bagi Indonesia dan malahan menjadi sporadik dan endemik, Dalam rangka meningkatkan status kesehatan ini, status penyakit yang bersifat wabah harus secara bertahap dibebaskan pulau per pulau.

5) Meningkatkan investasi peternakan;

Investasi peternakan masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan sektor pertanian lainnya. Padahal sektor peternakan mempunyai peluang untuk dikembangkan jika melihat kebutuhan akan produk peternakan yang semakin meningkat. Untuk itu upaya untuk meningkatkan investasi dibidang peternakan akan dapat meningkatkan produk ternak serta meningkatkan kesejahteraan peternak.

6) Meningkatkan kesejahteraan peternak.

Kesejahteraan peternak dapat meningkat sebagai akibat dari pendekatan teknis yaitu pelayanan kesehatan hewan, pelayanan reproduksi, pakan, bibit, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil. Selain itu peningkatan pendapatan nasional yaitu dengan permodalan, kebijaksanaan suku bunga atau akses ke sumber-sumber keuangan dan teknologi. Kedua pendekatan ini harus saling bersinergi untuk mendapatkan pendapatan peternak. Kesejahteraan peternak diukur dari indeks yang diterima peternak dari hasil ternaknya dibandingkan jumlah yang harus dibayar oleh peternak.

b. Indikator Tujuan

Untuk mengukur tujuan yang akan dicapai maka ditetapkanlah indikator tujuan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	2019
a. Meningkatkan produksi ternak	Produksi daging	ribu ton	4.922,51
	Produksi telur	ribu ton	3.770,00
	Produksi susu	ribu ton	1.063,56
b. Meningkatkan kualitas komoditas ternak	Ternak yang bersertifikat/SKLB	ekor	3.730
c. Meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor	Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan	persen	88,16
	Volume ekspor komoditi peternakan	persen	6
d. Meningkatkan status kesehatan hewan	Status Kesehatan Hewan	persen	80
e. Meningkatkan investasi peternakan	Investasi sub sektor peternakan PMA	persen	2,5
	Investasi sub sektor peternakan PMDN	persen	3
f. Meningkatkan kesejahteraan peternak	Indek Nilai Tukar Peternak	Indek	108,12
	PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan	Rp. Juta	44,17

4. Sasaran

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi pangan asal hewan, daya saing dan pendapatan peternak. Masing-masing sasaran tersebut mempunyai indikator yang ingin dicapai selama kurun waktu 2015 – 2019 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Program. Adapun IKSP tersebut dapat dirumuskan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target (th)			
			2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan produksi Pangan Hewani asal ternak	a. Produksi daging sapi kerbau (000 ton)	588,56	639,61	694,96	755,04
		b. Produksi daging ternak lainnya (000 ton)	3.678,67	3.796,88	3.969,57	4.167,51
		c. Produksi telur (000 ton)	3.393,36	3.536,86	3.655	3.770
		d. Produksi susu (000 ton)	850,77	910,57	980,88	1.063,56
2	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Peternakan	e. Ternak yang bersertifikat/SKLB (ekor)	10.880	2.950	3.245	3.730
		f. Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan (%)	63,33	72,76	80,37	88,16
		g. Volume ekspor komoditi peternakan (%)	3	4	5	6
		h. Status Kesehatan Hewan (%)	73	76	78	80
		i. Investasi sub sektor peternakan PMA (%)	1	2	2	2,5
		Investasi sub sektor peternakan PMDN (%)	1	2	2,5	3
3	Meningkatkan Kesejahteraan Peternak	j. PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan (Rp. Juta)	37,14	39,49	41,83	44,17
		k. Nilai Tukar Peternak (NTP)	107,23	107,53	107,82	108,12

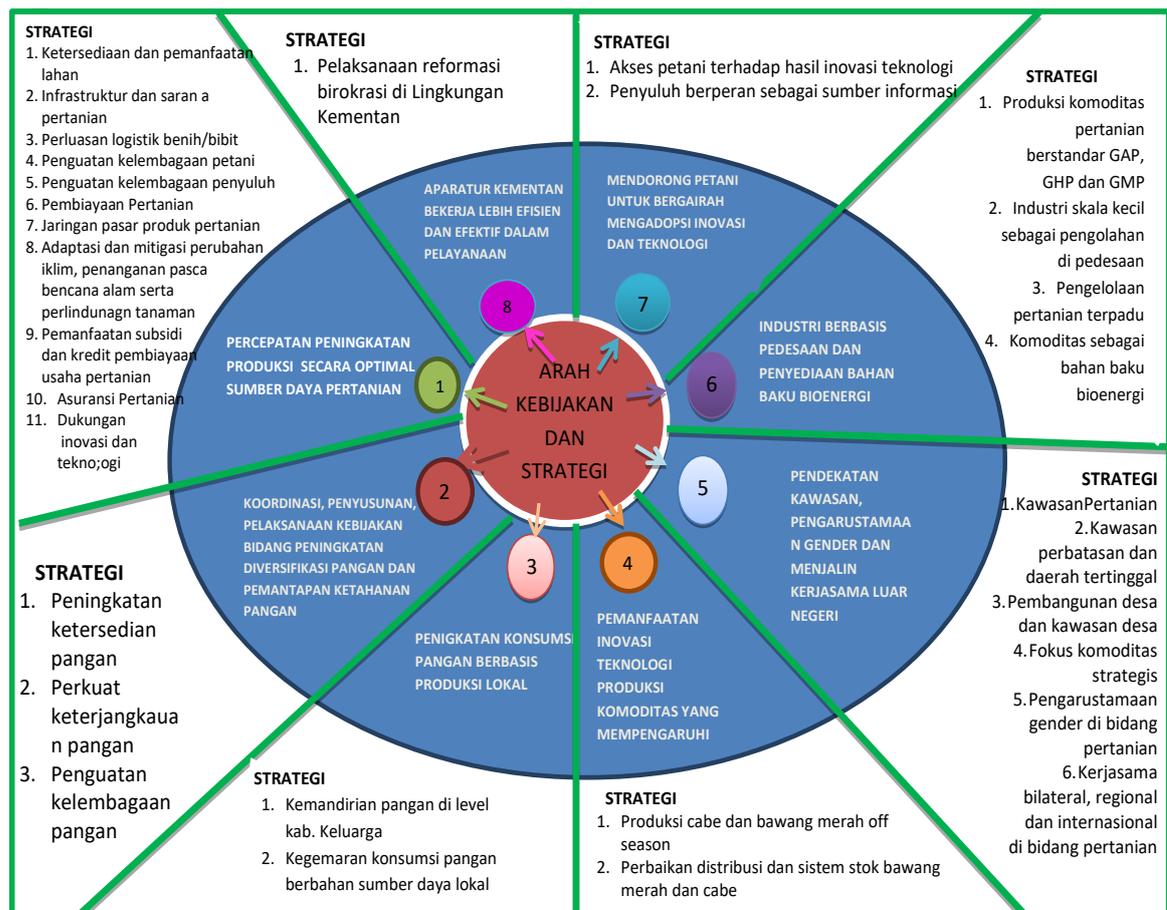
BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam kurun waktu 2015-2019 arah kebijakan yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengacu dengan arah kebijakan jangka menengah pembangunan pertanian nasional. Kebijakan pembangunan pertanian tersebut bertujuan untuk mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian

Arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini.



Gambar 3.1. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kementerian Pertanian

Pada gambar diatas menunjukkan hubungan arah dan strategi pembangunan pertanian. Kebijakan Kementerian Pertanian dan strateginya diarahkan untuk :

1. Melakukan upaya khusus percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya pertanian dengan strategi yaitu meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, meningkatkan infrastruktur dan sarana pertanian, mengembangkan dan memperluas logistik benih/bibit, mendorong penguatan kelembagaan petani, memperkuat kelembagaan penyuluhan, mengembangkan dan mendorong pembiayaan pertanian, memperkuat jaringan pasar produk pertanian, melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan *pasca* bencana alam serta perlindungan tanaman, mengelola dan mendorong pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian, mendorong upaya perlindungan usaha pertanian melalui asuransi pertanian dan meningkatkan dukungan inovasi dan teknologi.
2. Melaksanakan koordinasi serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan dengan strategi yaitu melakukan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, melakukan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk memperkuat keterjangkauan pangan dan melakukan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk penguatan kelembagaan pangan.
3. Mendorong peningkatan konsumsi pangan berbasis produksi lokal dengan strategi yaitu mendorong kemandirian pangan di level Kabupaten dan keluarga dan menciptakan kegemaran konsumsi pangan berbahan sumber daya lokal.
4. Mendorong pemanfaatan inovasi teknologi produksi komoditas yang mempengaruhi inflasi dengan strategi yaitu mendorong produksi cabe dan bawang merah *off season* dan mendorong perbaikan distribusi dan sistem stok bawang merah dan cabe.
5. Membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama luar negeri dengan strategi yaitu mengembangkan kawasan pertanian, mendukung pengembangan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal, mendukung pembangunan desa dan kawasan desa fokus komoditas strategis, melakukan koordinasi penerapan pengarusutamaan gender di bidang pertanian dan melaksanakan kerjasama bilateral, regional dan internasional di bidang pertanian yang saling menguntungkan.
6. Mendorong majunya industri berbasis pedesaan dan penyediaan bahan baku bioenergi dengan strategi yaitu mendorong produksi komoditas pertanian berstandar *Good Agriculture Practice* (GAP), *Good Handling Practice* (GHP) dan *Good Manufacturing Practice* (GMP), mendorong

majunya industri skala kecil sebagai pengolahan hasil pertanian yang berada di pedesaan, mendorong pengelolaan pertanian terpadu dan menyiapkan komoditas sebagai bahan baku bioenergi.

7. Mendorong petani untuk bergairah mengadopsi inovasi dan teknologi dengan strategi yaitu meningkatkan akses petani terhadap hasil inovasi teknologi dan mendorong penyuluh berperan sebagai sumber informasi
8. Mendorong aparatur Kementan bekerja lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan dengan strategi yaitu mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementan.

B. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Arah Kebijakan

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyesuaikan dengan Kementerian Pertanian. Dalam arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian tersebut telah ditetapkan kebijakan untuk peternakan dan kesehatan hewan yaitu :

- a. Percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya peternakan. Arah kebijakan ini akan ditempuh dengan langkah operasional peningkatan produksi daging melalui:
 - 1) Peningkatan perbibitan dan produksi ternak;
 - 2) Pengembangan pakan ternak;
 - 3) Kesehatan hewan;
 - 4) Dukungan kelembagaan dan pengembangan usaha peternakan.
 - 5) Dukungan manajemen kesekretariatan.
- b. Peningkatan komoditas peternakan bernilai tambah dan berdaya saing. Kebijakan ini akan ditempuh dengan langkah operasional berupa peningkatan komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing melalui:
 - 1) Peningkatan perbibitan dan produksi ternak;
 - 2) Pengembangan pakan ternak;
 - 3) Kesehatan hewan;
 - 4) Pengolahan dan pemasaran hasil ternak;
 - 5) Penjaminan pangan asal hewan;
 - 6) Dukungan manajemen kesekretariatan.

2. Strategi

Dalam peta strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah disesuaikan dengan strategi Kementerian Pertanian sebagai nampak pada gambar 3.1. Sehingga Strategi Ditjen Peternakan dan Kesehatan hewan terkait dengan strategi :

a. Mendorong peningkatan konsumsi pangan berbasis produksi lokal

Peningkatan konsumsi daging, telur dan susu masyarakat Indonesia dinilai masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Peningkatan konsumsi tersebut pencapaiannya disampaikan bahwa Tahun 2004 konsumsi protein asal ternak 4,7 g/kapita/hari, sementara Malaysia, Thailand dan Filipina rata-rata 10 g/kapita/hari, Korea, Brazil dan Tiongkok sebesar 20 – 40g dan negara maju seperti AS, Perancis, Jepang, Kanada dan Inggris sebesar 50-80 g/kapita/hari. Oleh karena itu strategi untuk terus mendorong peningkatan konsumsi pangan berbasis produksi lokal akan terus dikembangkan sehingga produk peternakan lokal tersebut menjadi terjangkau oleh masyarakat. Produk perunggasan merupakan komoditas yang lebih terjangkau dari segi harga seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Hubungan Protein Hewani dan Harga

No	Jenis/Spesies	Prosentase Protein (%)	Harga Protein Hewani (Rp/gr)
1.	Telur ayam ras petelur	12,8	156,25
2.	Daging ayam ras pedaging	18,2	165
3.	Telur burung puyuh	12,8	180
4.	Daging itik	16	200
5.	Telur ayam buras	12,8	234
6.	Telur itik manila	12,8	234
7.	Telur itik	12,8	264
8.	Daging ayam buras	18,2	302
9.	Susu	3,2	313
10.	Daging kelinci	16,6	392
11.	Daging kuda	18,1	414
12.	Daging domba	17,1	526
13.	Daging kerbau	18,7	535
14.	Daging kambing	16,6	542
15.	Daging sapi	18,8	585

Sumber : Data BPS diolah

- b. Peningkatan komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing

Selain komoditas daging sapi maka komoditas yang dinilai memiliki nilai tambah dan berdaya saing adalah produksi susu, produksi daging kambing dan domba, produksi daging babi yang dapat dinilai dari perbandingan eksportnya terhadap produksi pertanian strategis lainnya. Selain itu dihitung dari penurunan volume impor produk pertanian strategis yang lain. Produksi susu setiap tahunnya dari produksi lokal hanya mencapai 805,4 ribu ton (angka sementara tahun 2015) sedangkan target konsumsinya berdasarkan data dari BPS diolah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Konsumsi Susu Per Kapita Per Tahun

No	Komoditi	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Susu Segar/ <i>Fresh Milk</i>	liter	0,168	0,181	0,196	0,212	0,229
2.	Susu cair pabrik/ <i>Preserved milk</i>	250 ml	1,858	2,137	2,457	2.826	3.250
3.	Susu kental manis/ <i>Sweet canned liquid milk</i>	397 gram	3,323	3,590	3,879	4,191	4,528
4.	Susu bubuk/ <i>Canned powder milk</i>	kg	0.860	0,946	1,041	1,146	1,261
5.	Susu bubuk bayi/ <i>Baby powder milk</i>	400 gram	1,535	1,614	2,665	2,802	2,946
6.	Keju/ <i>Cheese</i>	kg	0,013	0,017	0,023	0,031	0,042
7.	Hasil lain dari susu/ <i>Milk product</i>	kg	0,031	0,032	0,033	0,034	0,035

Sumber : BPS (diolah)

Produksi daging kambing dan domba adalah komoditas yang memiliki potensi untuk ekspor misalnya, kebutuhan untuk negara tetangga dan negara Timur Tengah untuk kepentingan ritual keagamaan. Demikian juga untuk produksi daging babi yang sudah terbukti untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dengan target nilai eksportnya seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3. Volume Ekspor Ternak Babi

No.	Komoditas	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Babi (kg)	32.326.817	32.378.539	32.430.344	32.482.232	32.534.203

Sumber : Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2014 & 2015

Produk lainnya yang dinilai memiliki daya saing adalah obat hewan yang telah diekspor ke-17 negara. Obat hewan ini merupakan sumber ekspor terpenting disamping juga melakukan impor bahan bakunya.

Meningkatkan daya saing juga tergantung kepada status kesehatan hewan, artinya seberapa banyak Indonesia telah berhasil membebaskan penyakit hewan menular, daerah endemik dan daerah tertular.

c. Penyediaan bahan baku bio industri dan bio energi

Limbah bahan baku hasil usaha peternakan dapat menjadi sumber energi alternatif yaitu dari kotoran ternak untuk pembuatan biogas yang menghasilkan energi. Kotoran ternak lainnya yaitu urin dapat menjadi pupuk organik setelah mengalami pengolahan. Selain itu banyak hasil peternakan yang dipakai untuk industri obat, kosmetik dan industri rumah tangga lainnya.

d. Peningkatan pendapatan keluarga petani

Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) peternakan dan jumlah tenaga kerja peternakan cenderung kearah yang lebih baik. Artinya jumlah PDB yang semakin meningkat dibagi dengan jumlah tenaga kerja peternakan memungkinkan angka rasionya semakin baik. Target perkembangan PDB dan tenaga kerja peternakan dari tahun 2015 sampai 2019 disampaikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4. PDB dan Tenaga Kerja Peternakan (2015 – 2019)

No.	Variabel	Tahun				r (%)
		2015	2016	2017	2018	
1.	PDB (Rp Milyar)	138.807	145.830	153.208	160.960	5.06
2.	Tenaga Kerja (orang)	4.096.049	4.014.128	3.933.845	3.855.168	- 2

Sumber : BPS (diolah)

Dari tabel tersebut nampak terjadi penurunan tenaga kerja yang bergerak dalam usaha peternakan, dapat diartikan usaha peternakan skala kecil mulai hilang secara alami. Penurun tenaga kerja ini ditopang oleh Nilai Tukar Petani-Peternak (NTPP) yang semakin tahun cenderung ada peningkatan, sementara untuk sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan cenderung menunjukkan penurunan. Kondisi ini memungkinkan peternakan dan kesehatan hewan di masa mendatang dapat menjadi sumber pertumbuhan pembangunan pertanian.

e. Peningkatan kualitas petani dan kelembagaannya

Peningkatan kualitas petani dilakukan melalui pendidikan dan latihan serta perbaikan manajemen melalui pendampingan yang dilakukan secara terus menerus, sehingga kelompok tani/ternak tersebut memperoleh status badan usaha/mandiri. Dengan diperolehnya status

badan usaha tersebut maka kelembagaan petani/peternak dapat memiliki daya saing dan memperoleh akses pembiayaan dan pasar. Untuk itu akan ditempuh melalui pengembangan kawasan komoditas peternakan, dan salah satu model yang saat ini dikembangkan adalah Sentra Peternakan Rakyat/SPR.

- f. Peningkatan kualitas aparatur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Strategi ini dipilih sebagai unsur pendukung tercapainya sasaran program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Dalam meningkatkan kualitas aparatur maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan membuka peluang untuk belajar atau berlatih dalam jenjang pendidikan formal, informal termasuk pejabat fungsional dari berbagai rumpun keahlian. Saat ini pejabat fungsional tersebut berjumlah 978 orang dan pada masa mendatang pejabat fungsional akan semakin penting dan strategis untuk mengantisipasi perubahan birokrasi yang kaya fungsi hemat struktur.

C. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Operasionalisasi dari kebijakan tersebut memerlukan piranti regulasi sehingga kebijakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

1. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah kebutuhan regulasi yang diperlukan dalam rangka kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan para *stakeholder*. Selama kurun waktu 2015 – 2019 regulasi yang dibutuhkan banyak terkait dengan peraturan daerah yang mengatur: tata ruang peternakan dan keswan; pengendalian pemotongan betina produktif; penetapan kawasan peternakan; pengembangan ternak dilahan sawit/hutan, pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen. Selain itu akan didorong dan diarahkan badan, instansi dan berbagai perusahaan untuk mengembangkan CSR/BKBL di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Tata ruang memerlukan regulasi di bidang lahan yaitu percepatan penerbitan Pergub/Perbup untuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Di bidang sarana dan prasarana serta pembiayaan diperlukan regulasi sarana peternakan untuk pengembangan sistem perbenihan dan mempercepat serta mempermudah persyaratan akses peternak pada skim kredit. Untuk perlindungan peternak sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani masih perlu dikembangkan beberapa Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian. Kebutuhan regulasi lainnya terkait dengan bidang ekspor dan impor produk peternakan dan regulasi untuk kemudahan investasi pada sektor peternakan dan kesehatan hewan.

2. Kerangka Kelembagaan

Kelembagaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selama ini mengacu pada Permentan Nomor 43 Tahun 2015 sebagai bagian dari organisasi Kementerian Pertanian, kelembagaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kurun waktu 2015 – 2019 akan terus menyesuaikan dengan tuntutan pelayanan masyarakat.

Pelayanan dan kelembagaan yang perlu diperkuat untuk keberlangsungan pembangunan ke depan adalah pelayanan terkait fungsi perbibitan dan kesehatan hewan, selain penguatan kelembagaan pelayanan lainnya melalui perbaikan sistem yang sudah ada. Diprediksi pengaruh global dan tuntutan kemajuan di sektor peternakan dan keswan akan terjadi di beberapa tahun mendatang, oleh karena itu, kelembagaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan menyesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan eksternal dan internal yang ada.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Dengan melihat kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2015 – 2019 maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah merumuskan programnya yaitu :

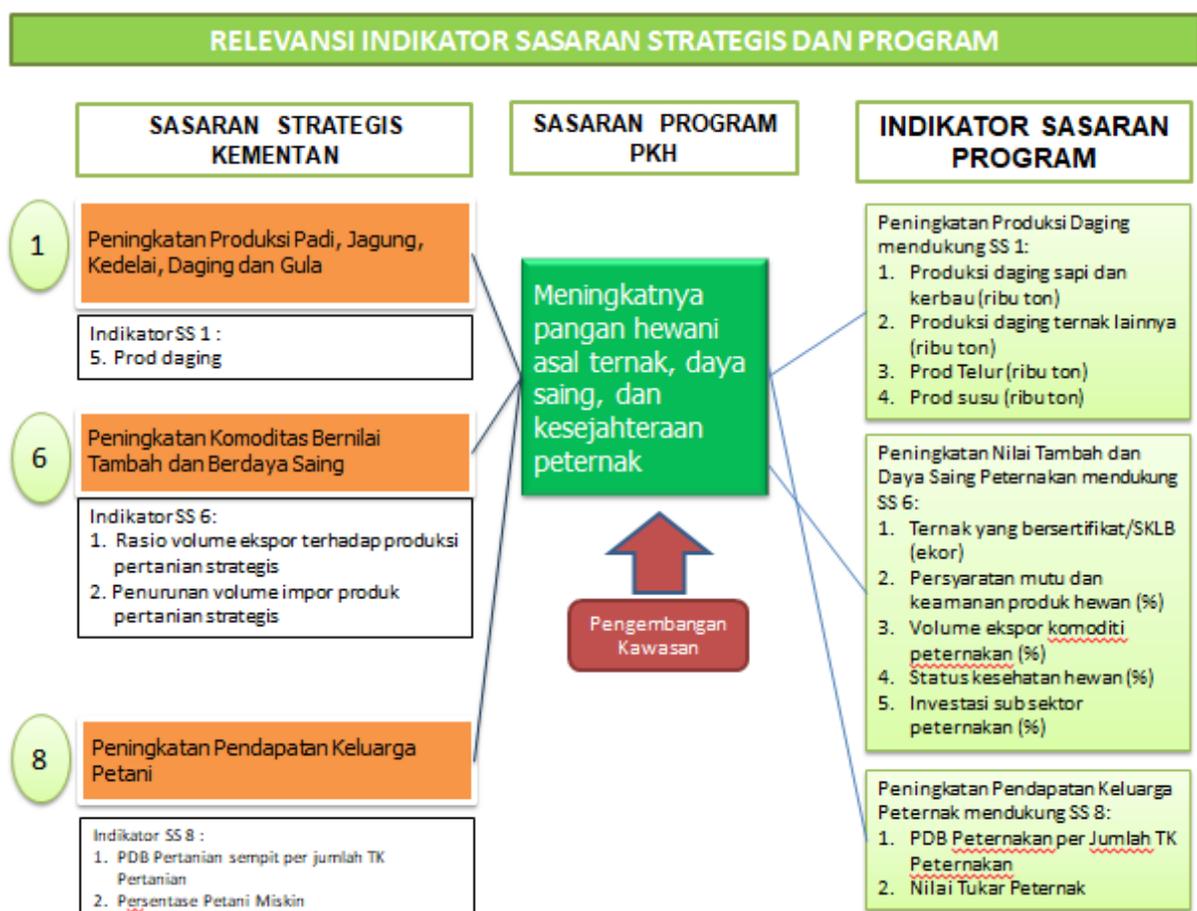
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

Arah program mengarah pada 2 (dua) kata kunci dalam program tersebut, yaitu: **kata kunci pertama**, pemenuhan pangan asal ternak yang mengarah pada pencapaian peningkatan populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu). **Kata kunci kedua** adalah agribisnis peternakan rakyat yang mengarah pada peningkatan daya saing peternakan dan kesehatan hewan.

Program ini dilakukan dengan pendekatan ekonomis, pendekatan agribisnis dan pendekatan teknis. Dengan pendekatan ekonomis yaitu perbaikan tataniaga ternak dan produk ternak, mendorong insentif peternakan dan pemberdayaan peternak yang sarasannya adalah peningkatan produksi daging, telur dan susu. Sasaran lainnya adalah pengembangan ekspor dan daya saing yang mencakup komoditas kambing dan babi serta produk ternak berupa kulit, tanduk, semen beku dan obat hewan. Nilai tukar peternak juga menjadi sasaran dengan pendekatan ekonomis. Pendekatan agribisnis berupa penguatan kawasan dan kelembagaan peternakan, regulasi peternakan dan kesehatan hewan serta penerapan teknologi dan sistem informasi. Adapun yang menjadi fokus komoditas dan lokasinya adalah pengembangan sembilan komoditas peternakan yaitu; sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam lokal, itik, babi dan ayam ras yang mengarah pada pengolahan. Melalui pendekatan agribisnis juga akan dikembangkan pengembangan kawasan dan peternakan komunal. Pendekatan teknis yaitu penguatan infrastruktur pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal serta peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas SDM peternakan dan kesehatan hewan melalui kegiatan utama: produksi ternak, produksi pakan ternak, produksi bibit ternak, peningkatan penanganan kesehatan hewan dan penjaminan pangan yang ASUH dan pengolahan serta pemasaran.

B. Kaitan Antara Indikator Sasaran Strategis Kementan, Program dan Indikator Sasaran Program

Penyusunan program Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun tidak terlepas dari Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yaitu terkait dengan peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula selain hal tersebut juga terkait dengan peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dan sasaran strategis peningkatan pendapatan keluarga petani. Masing-masing sasaran strategi Kementerian Pertanian tersebut memiliki indikator yang mengarah pada sasaran program peternakan dan kesehatan Hewan yaitu meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak, daya saing dan kesejahteraan peternak. Sasaran program Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memiliki indikator sasaran yang secara khusus dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



Gambar 4.1. *Cascading* Sasaran Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Pada Gambar 4.1 tersebut sasaran strategi yang terkait dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:

1. Peningkatan produksi daging
 - a. Produksi daging sapi kerbau
2. Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing
 - a. Produksi daging ternak lainnya
 - b. Produksi telur
 - c. Produksi susu
 - d. Ternak bersertifikat/SKLB
 - e. Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan
 - f. Volume ekspor komoditi peternakan
 - g. Status kesehatan hewan
 - h. Investasi sub sektor peternakan
3. Peningkatan kesejahteraan keluarga peternak
 - a. PDB peternakan terhadap jumlah tenaga kerja peternakan
 - b. Nilai tukar peternak

C. Kegiatan

Untuk mencapai Sasaran Program yaitu meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak, daya saing dan pendapatan peternak dalam mendukung terwujudnya 3 Sasaran Strategis Kementan yang terkait dengan Ditjen Peternakan dan Keswan (Gambar 4.1), diperlukan langkah operasional sebagai berikut :

1. Peningkatan perbibitan dan produksi ternak (produktivitas), akan ditempuh dengan kegiatan/langkah operasional yaitu :
 - a. Pengembangan populasi sapi dan kerbau
 - b. Produksi benih sapi dan kerbau
 - c. Pengembangan populasi kambing dan domba
 - d. Pengembangan populasi babi
 - e. Pengembangan populasi unggas dan aneka ternak
 - f. Peningkatan produktifitas ternak sapi dan kerbau
 - g. Penambahan indukan dan pejantan sapi
2. Peningkatan produksi mutu dan keamanan pakan ternak akan ditempuh langkah operasional
 - a. Pengembangan hijauan pakan ternak
 - b. Pengembangan pakan olahan dan bahan pakan
 - c. Pengembangan mutu dan keamanan pakan
3. Peningkatan status kesehatan hewan akan ditempuh langkah operasional :
 - a. Penanganan dan pengendalian PHMSZ

- b. Penanganan dan pengendalian penyakit Anthraks
 - c. Penanganan dan pengendalian Rabies
 - d. Penurunan angka kematian ternak
 - e. Peningkatan kesehatan hewan pemasukan dan pengeluaran
 - f. Peningkatan mutu dan keamanan bahan pakan asal hewan
 - g. Peningkatan volume ekspor obat hewan
4. Peningkatan mutu dan keamanan produk hewan akan ditempuh langkah operasional:
- a. Peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH
 - b. Penerapan kesejahteraan hewan
 - c. Pencegahan penularan zoonosis
5. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan akan ditempuh langkah operasional:
- a. Peningkatan fasilitasi UPH peternakan pangan dan non pangan
 - b. Peningkatan fasilitasi pengolahan biogas, kompos, dan pupuk cair
 - c. Peningkatan volume ekspor komoditi peternakan
 - d. Perbaikan tataniaga peternakan
 - e. Peningkatan investasi subsektor peternakan
 - f. Peningkatan aksesibilitas pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan
 - g. Penguatan kelembagaan peternakan
6. Peningkatan akuntabilitas akan ditempuh langkah operasional
- a. Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya
 - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP

Kegiatan operasional tersebut akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam aktivitas kegiatan atau rincian kegiatan untuk mendukung tercapainya target kinerja fungsi dan sasaran program yang telah ditetapkan. Target masing-masing kegiatan operasional tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 6.8.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian kinerja, dalam implementasinya kegiatan operasional akan difokuskan pada lokasi pengembangan kawasan komoditas peternakan, lokasi tematik dan lokasi lainnya mengacu kebijakan yang telah ditetapkan.

BAB V

PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN

Dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 pendekatan pembangunan pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan akan dilaksanakan melalui pendekatan kawasan. Pendekatan kawasan komoditas ini dipilih untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendanaan pemerintah yang semakin terbatas. Konsep pembangunan kawasan adalah wilayah yang berbasis pada keberadaan fisik dan ekonomi tetapi memiliki hubungan erat dan saling mendukung satu sama lain secara fungsional untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam kaitan ini kawasan tersebut memiliki fungsi tertentu yang di dalamnya terdapat kegiatan sektor ekonomi dan produk unggulannya serta mempunyai potensi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar.

Sedangkan kawasan komoditas peternakan dan kesehatan hewan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan bagi kegiatan peternakan terpadu. Kawasan peternakan berdasarkan hubungannya dengan usaha tani dapat bersifat *land base livestock* dan *non land base livestock*. *Land base livestock* terutama ternak ruminansia besar dan kecil yang bersifat komplementer dengan usaha tani. Sedangkan *non land base livestock* adalah ternak non ruminansia yaitu unggas dan babi yang bersifat suplementer.

A. Amanat Peraturan Perundangan Tentang Kawasan Peternakan

Sebagai dasar dari perlunya pengembangan kawasan maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ketiga undang-undang tersebut berintikan untuk kesejahteraan masyarakat, yang kemudian dalam pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 tahun 2012 tentang kawasan pertanian dan diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak. Inti dari penjabaran kedua Peraturan Perundangan tersebut adalah pengembangan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat.

Mendasarkan pada kebijakan tersebut, arah kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan kurun waktu 2015-2019, dengan sasaran program yaitu meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak daya saing dan pendapatan peternak akan ditempuh melalui pengembangan kawasan.

B. Ciri Usaha dan Pengembangan Komoditas Peternakan

Ciri usaha komoditas peternakan (spesifik dan sangat berbeda dengan sub sektor lainnya) adalah komoditas bergerak, perlu lahan tetapi tidak punya ruang (RTRW), skala tidak ekonomis, menyebar, produksi dihitung di sentra konsumen dan bukan di sentra produksi, rantai tata niaga panjang (sentra produksi – sentra konsumen).

Mengacu pada konsepsi kawasan, maka pengembangan kawasan peternakan harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam pengembangan/pertumbuhan ekonomi wilayah dengan mengoptimalkan potensi spesifik daerah yang dimiliki.

C. Kriteria Penentuan Kawasan Peternakan

Pada dasarnya semua lokasi bisa dijadikan lokasi pengembangan kawasan. Namun demikian, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, maka diperlukan prioritas pengembangan lokasi kawasan. Untuk menentukan lokasi prioritas akan digunakan beberapa kriteria yang mencerminkan kedudukan basis atau potensi suatu lokasi yang dicirikan dari ketersediaan biomassa pakan, populasi, produksi, infrastruktur/ kelembagaan, rumah tangga peternak, status penyakit, ketersediaan masterplan dan rencana aksi. Dengan ditetapkan lokasi pengembangan kawasan ini diharapkan pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dapat efisien dan efektif, guna mendorong usaha ternak ke arah bisnis.

Keberhasilan pengembangan kawasan menuntut adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan swasta. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan integrasi dan sinergisme kewenangan dari masing-masing *stakeholder* sesuai masterplan dan rencana aksi yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan secara *multiyears*. Beberapa indikator keberhasilan pengembangan kawasan diantaranya akan terlihat dari kemandirian peternak dalam berusaha dan kelembagaannya yang telah berbadan hukum dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Secara bertahap lokasi pengembangan kawasan akan diperluas ke daerah prioritas lainnya sesuai kebutuhan dan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria penentuan lokasi pengembangan kawasan terlihat seperti gambar berikut.



Gambar 5.1. Kriteria Penentuan Kawasan Peternakan

Pelaksanaan pengembangan kawasan peternakan akan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman tersendiri dan tidak terpisahkan dalam kerangka pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Pembiayaan

Pembiayaan untuk pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dapat berasal dari sektor pemerintah, swasta dan masyarakat. Dari sektor pemerintah dapat dilakukan melalui dana APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, sedangkan dari sektor swasta dapat berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan dari sektor masyarakat berupa swadaya masyarakat untuk investasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Pembiayaan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan PDB peternakan dan membuka kesempatan kerja dalam mendukung kinerja pembangunan nasional.

1. Pembiayaan Dari Pemerintah (APBN dan APBD)

Dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diharapkan dapat merumuskan kebijakan dan melaksanakan kebijakan, menggerakkan fungsi-fungsi peternakan dan kesehatan hewan di bidang pengembangan perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

Fungsi APBN diharapkan dapat menjadi faktor stabilisasi, distribusi dan alokasi untuk mengungkit berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Adapun rencana kebutuhan pembiayaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang bersumberkan dari APBN selama tahun 2016 – 2019 disampaikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Anggaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016 – 2019

NO	Fungsi	TAHUN				TOTAL
		2016	2017	2018	2019	
Alokasi Anggaran (Milyar)						
1	Pakan	510,10	800,43	874,00	980,00	3.164,53
2	Keswan	302,53	1.641,11	1.828,01	1.975,80	5.747,45
3	Perbibitan dan Produksi	914,02	1.062,19	1.198,43	1.252,45	4.427,09
4	Kesmavet	89,53	346,00	397,10	445,20	1.277,83
5	PPH-Nak	52,92	132,34	150,16	165,94	174,84
6	Sekretariat	291,84	368,63	385,45	403,71	1.449,63
	TOTAL	2.160,94	4.350,70	4.833,15	5.223,10	

Kebutuhan alokasi APBN yang tersedia tersebut akan digunakan untuk berbagai fungsi peternakan dan kesehatan hewan diharapkan dapat menjadi pengungkit pertumbuhan PDB peternakan, menarik investasi, yang akhirnya dapat membuka kesempatan lapangan kerja yang baru dan meningkatkan kesejahteraan peternak.

Kontribusi pembiayaan bersumberkan dari APBD, diharapkan mencapai sebesar 30% dari APBN dan bersinergi dengan aktivitas kegiatan yang muaranya mendukung pencapaian target kinerja program dan fungsi kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

2. Pembiayaan dari Sektor Swasta

Pembiayaan dari sektor swasta baik berasal dari PMA dan PMDN harus terus ditingkatkan terutama difokuskan di berbagai wilayah kawasan Indonesia Timur karena selama ini penanaman modal masih terkonsentrasi di kawasan barat Indonesia. Peluang dan potensi investasi sektor swasta di Indonesia Timur terbuka luas terutama dengan peternakan dan sistem *ranch* serta berbagai industri pendukungnya.

Kebijaksanaan pemerintah yang banyak memberikan kemudahan investasi di Indonesia Timur dapat berupa kemudahan perijinan, hak guna lahan, *tax holiday*, skim kredit khusus akan mendorong pihak swasta menanamkan investasinya.

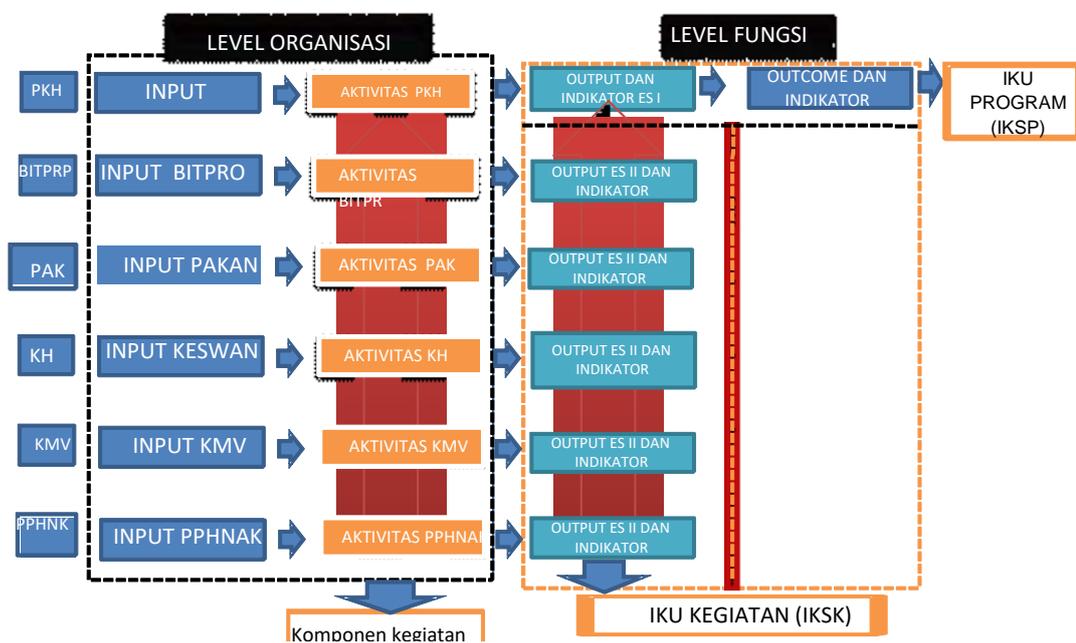
3. Pembiayaan dari Masyarakat

Pembiayaan dari masyarakat dapat berbentuk investasi dibidang pembibitan atau re-investasi ternak yang dimilikinya. Dibandingkan dengan pembiayaan dari APBN dan swasta ternyata pembiayaan dari masyarakat cukup besar sehingga pembiayaan dari masyarakat merupakan faktor utama dalam pembiayaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

B. Indikator Kinerja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/ Satker/ Penugasan tertentu yang berisikan komponen untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.

Sasaran program (outcome) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan yang mencerminkan pelaksanaan kinerja fungsi atau berfungsinya keluaran (output). Outcome tersebut merupakan agregasi dan atau sinergitas berbagai output fungsi kegiatan yang mencerminkan kinerja fungsi dalam program tersebut. Ukuran keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menjalankan fungsinya, dilihat dari Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Sedangkan pada level eselon II, ukuran kinerja fungsi kegiatan, dicerminkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Adapun berdasarkan struktur posisi IKSP dan IKSK dapat dicerminkan pada Gambar 6.1.



Gambar. 6.1 Struktur IKSP dan IKSK

Berikut adalah beberapa informasi yang menggambarkan kinerja program dan kegiatan yang disebut dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dari masing-masing direktorat teknis. Pejabaran IKSP dan IKSK, sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)

Selama periode tahun 2015-2019 keberhasilan pelaksanaan pembangunan peternakan dan keswan akan dilihat dari IKSP yang ditetapkan. IKSP tersebut mewujudkan sasaran kinerja pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian sekaligus pertanggungjawaban mandat fungsi Ditjen Peternakan dan Keswan. Terdapat 14 (empat belas) Indikator Kinerja Sasaran Program Pembangunan Peternakan dan Keswan disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 6.2. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)

No	Sasaran Strategis	Indikator		Target (th)			
				2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan produksi Pangan Hewani asal ternak	a.	Produksi daging sapi kerbau (000 ton)	588,56	639,61	694,96	755,04
		b.	Produksi daging ternak lainnya (000 ton)	3.678,67	3.796,88	3.969,57	4.167,51
		c.	Produksi telur (000 ton)	3.393,36	3.536,86	3.655	3.770
		d.	Produksi susu (000 ton)	850,77	910,57	980,88	1.063,56
2	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Peternakan	e.	Ternak yang bersertifikat/SKLB (ekor)	10.880	2.950	3.245	3.730
		f.	Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan (%)	66,57	72,76	80,37	88,16
		g.	Volume ekspor komoditi peternakan (%)	3	4	5	6
		h.	Status Kesehatan Hewan (%)	73	76	78	80
		i.	Investasi sub sektor peternakan PMA (%)	1	2	2	2,5
			Investasi sub sektor peternakan PMDN (%)	1	2	2,5	3
3	Meningkatkan Kesejahteraan Peternak	j.	PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan (Rp. Juta)	37,14	39,49	41,83	44,17
		k.	Nilai Tukar Peternak (NTP)	107,23	107,53	107,82	108,12

2. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Tercapainya 14 sasaran program pembangunan peternakan dan keswan di atas harus didukung kinerja fungsi kegiatan di setiap Direktorat Teknis. Tercapainya sasaran kinerja fungsi kegiatan merupakan keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional yang akan difasilitasi setiap tahunnya. Indikator kinerja fungsi masing-masing kegiatan, sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Perbibitan dan Produksi Ternak

Untuk mendukung sasaran kinerja program, terdapat 40 (empat puluh) target kinerja fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Kinerja fungsi perbibitan dan produksi ternak disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 6.3. IKSK Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) BITPRO	TARGET				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Populasi ternak					
1. Populasi Ternak sapi dan kerbau					
a. Populasi ternak sapi potong					
1). Betina Produktif (%)	42	42	45	45	46
2). Angka kelahiran sapi (%)	20,83	20,85	20,90	21,00	21,15
3). <i>Service per Conception/SC</i> sapi (indeks)	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7
4). <i>Calving Interval/CI</i> sapi (bulan)	18	18	17	17	16
b. Populasi sapi perah					
1). Betina Produktif (%)	55	60	60	62	65
2). Angka kelahiran sapi perah (%)	24	25	26	26	27
3). <i>Service per Conception/SC</i> sapi (indeks)	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4
4). <i>Calving Interval/CI</i> sapi (bulan)	17	17	16	16	15
c. Populasi ternak kerbau					
1). Betina Produktif (%)	42	42	45	45	46
2). Angka kelahiran anak (%)	18	19	19	19	20
3). <i>Calving Interval/CI</i> kerbau (bulan)	24	22	20	20	18
2. Populasi Ternak kambing dan domba					
a. Populasi ternak kambing					
1). Betina Produktif (%)	44	44	45	46	46
2). Angka kelahiran kambing (%)	46	48	50	50	50
b. Populasi ternak domba					
1). Betina Produktif (%)	40	42	42	43	44
2). Angka kelahiran domba (%)	25	28	28	30	30
3. Populasi ternak babi					
1). Betina Produktif (%)	23	25	25	27	27
2). Angka kelahiran babi (%)	95	97	97	97	97
4. Populasi Ternak Unggas Lokal dan Aneka Ternak					
a. Populasi ternak ayam					
1). Produksi telur (butir)	38	45	48	50	60
2). Produksi telur tetas (%)	70	70	70	70	70
3). Daya tetas Lokal (%)	60	65	65	70	70
b. Populasi ternak itik					
1). Produksi telur (butir)	128	130	135	140	140
2). Produksi telur tetas (%)	30	33	33	35	35
3). Daya tetas Lokal (%)	70	72	75	75	80

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) BITPRO	TARGET				
	2015	2016	2017	2018	2019
B. Produktivitas ternak					
1. Produktivitas Daging					
a. Produktivitas ternak sapi dan kerbau					
Bobot potong sapi dan kerbau (kg/ekor)					
1). Sapi Bali / Madura	250	275	300	325	350
2). Sapi persilangan / PO	350	375	400	425	450
3). Kerbau	350	350	375	375	400
b. Produktivitas ternak kambing dan domba					
1). Bobot potong kambing dan domba (kg/ekor)	22	25	30	30	35
c. Produktivitas ternak babi					
1). Bobot potong babi (kg/ekor)	80	90	95	100	100
d. Produktivitas ternak unggas					
1). Ayam					
Bobot potong ayam (kg/ekor)	1,25	1,30	1,35	1,40	1,40
2). Itik					
Bobot potong itik (kg/ekor)	1,30	1,35	1,40	1,50	1,50
2. Produktivitas Telur					
a. Ayam					
1). Produksi Telur (butir)	38	45	48	50	60
2). Produksi telur konsumsi (%)	33	34	34	35	35
b. Itik					
1). Produksi Telur (butir)	130	135	145	150	160
2). Produksi telur konsumsi (%)	90	85	85	80	80
3. Produktivitas susu					
a. Produksi susu sapi perah (liter/ekor/laktasi)	3.000	3.100	3.200	3.500	3.800

- b. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak
- Untuk mendukung sasaran kinerja program, terdapat 4 (empat) target kinerja fungsi Pakan Ternak yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Kinerja fungsi pakan ternak disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 6.4. IKSK Peningkatan Produksi Pakan Ternak

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) PAKAN	TARGET				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Produksi HPT					
1. Produksi HPT (ton/BK)	62.447,20	54.303,10	56.938,70	62.478,30	71.269,40
a. Pengembangan HPT di UPT Pusat	3.218	3.460	3.806	3.806	3.806
b. Pengembangan sumber benih/bibit HPT di UPTD	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
c. Pengembangan sumber benih/bibit HPT di Kelompok	3.300	3.850	4.400	4.950	5.500
d. Pengembangan Unit Usaha HPT	190	167	214	262	309
e. Pengembangan Padang Pengembalaan	2.422	2.076	2.768	3.460	4.152
f. Pemanfaatan Lahan Eks Tambang	2.422	1.038	1.038	1.038	4.152
g. Pemeliharaan Padang Pengembalaan	1.076	7.000	8.000	9.500	11.000
h. Pengembangan Integrasi Ruminansia	17.545	11.963	11.963	11.963	12.100
i. Gerbang Patas	29.524	22.000	22.000	24.750	27.500
2. Produksi dan Distribusi Benih/Bibit HPT (stek atau Kg)					
B. Produksi pakan olahan/bahan pakan					
1. Produksi pakan konsentrat unggas (ton)	722,00	1.668,00	1.960,00	2.252,00	2.800,00
a. Produksi pakan konsentrat di UPP	60	200	400	600	1.000
b. Pengembangan UBP	42	168	210	252	350
c. Produksi Revitalisasi UPP/LP	620	600	600	600	600
d. Konsentrat di UPT Sembawa dan Pelaihari	0	700	750	800	850
2. Produksi pakan konsentrat sapi potong/perah (ton)					
a. Produksi pakan konsentrat di UPP dan LP Ruminansia	840,00	720,00	1880,00	2400,00	3400,00
b. Penguatan pakan konsentrat sapi potong induk					
- Rata-rata BCS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
c. Penguatan pakan sapi perah					
- Kenaikan rata-rata produksi susu (liter/ekor/hari)	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
d. Penguatan pakan sapi potong penggemukan					
- Kenaikan PPBH (kg/ekor/hari)	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00
e. Produksi pakan konsentrat sapot/saper di UPT	0,00	6300,00	6750,00	7200,00	7650,00
3. Peningkatan mutu dan keamanan pakan (sampel)	10.300	11.700	11.950	12.200	12.450
a. Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan	4000	4000,00	4250,00	4500,00	4750,00
b. Pengawasan Mutu Pakan Daerah	600	700	700	700	700
c. Pengujian Keamanan Pakan	2700	3.600	3.600	3.600	3.600
d. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan	1500	1.700	1.700	1.700	1.700
e. Pengawasan Peredaran FA/FS	1500	1.700	1.700	1.700	1.700

- c. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Untuk mendukung sasaran kinerja program, terdapat 16 (enam belas) target kinerja fungsi Kesehatan Hewan yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Kinerja fungsi kesehatan hewan disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 6.5 IKSK Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) KESWAN	TARGET				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Wilayah bebas PHMSZ (provinsi/kabupaten/pulau)					
1. Rabies (provinsi/kabupaten/pulau)	185	193	194	269	303
2. Brucellosis (provinsi/kabupaten/pulau)	205	208	216	256	256
3. Avian Influenza (kompartemen)	93	95	231	319	438
4. Hog Cholera (provinsi/kabupaten/pulau)	17	18	18	18	51
B. Wilayah Pengendalian (provinsi/kabupaten/pulau)					
1. Anthrax	124	124	124	124	124
2. Gangguan Reproduksi	33	33	33	33	33

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) KESWAN	TARGET				
	2015	2016	2017	2018	2019
C. Menurunnya angka kasus PHMSZ (kasus)					
1. Rabies (kasus)		1374	1333	1293	1254
2. Anthrax (kasus)	37	35	25	18	13
3. Brucellosis (kasus)	132	124	106	91	78
4. Avian Influenza (kasus)	84	72	35	34	33
5. Hog Cholera (kasus)	72	50	45	40	35
6. Parasit (kasus)	1600	1560	1500	1450	1400
D. Menurunnya angka kematian (%)					
1. Sapi (%)	1,64	1,63	1,62	1,61	1,6
2. Kerbau (%)	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
3. Kambing (%)	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
4. Domba (%)	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
5. Babi (%)	19,59	19,59	19,59	19,59	19,59
6. Ayam Lokal (%)	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58
7. Itik (%)	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
8. Ayam Ras Petelur (%)	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
9. Ayam Ras Pedaging (%)	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
E. Peningkatan kesehatan hewan pemasukan dan pengeluaran (%)	2	2	2	2	2
F. Peningkatan mutu vaksin dan obat hewan (%)	5	5	5	5	5
G. Peningkatan mutu dan keamanan bahan pakan asal hewan (%)	5	5	5	5	5
H. Volume ekspor obat hewan (ton)	165,35	280.735	280.735	280.735	280.735
I. Status Kesehatan Hewan	70	73	76	78	80

d. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

Untuk mendukung sasaran kinerja program, terdapat 10 (Sepuluh) target kinerja fungsi Kesmavet yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Kinerja fungsi Kesmavet disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.6. IKSK Penjaminan Produk Hewan yang ASUH

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) KESMAVET	TARGET				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH (%)	61,62	66,57	72,76	80,37	88,16
1. Penerapan higiene, sanitasi, dan pascapanen pada unit usaha produk hewan (%)	39,98	50,65	61,53	74,21	85,13
2. Penerapan kehalalan pada produk hewan bagi yang dipersyaratkan (%)	44,00	49,72	57,78	70,00	83,89
3. Penerapan pengawasan keamanan produk hewan (%)	62,49	65,92	71,74	77,27	83,62
4. Penjaminan persyaratan kesmavet pemasukan dan pengeluaran produk hewan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B. Penerapan kesejahteraan hewan (%)	7,58	26,98	47,47	68,34	87,66
1. Penerapan kesejahteraan hewan (%)	9,27	19,41	37,59	60,95	85,62
2. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penerapan kesrawan (%)	5,88	34,56	57,35	75,74	89,71
C. Pencegahan penularan zoonosis (%)	14,96	29,60	41,07	54,29	65,07
1. Penerapan pencegahan penularan zoonosis (%)	9,33	10,67	24,78	38,00	59,56
2. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penerapan zoonosis (%)	20,59	48,53	57,35	70,59	70,59

e. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Untuk mendukung sasaran kinerja program, terdapat 5 (lima) target kinerja fungsi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Kinerja fungsi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.7. IKSK Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) P2HP	TARGET				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Peningkatan produk olahan peternakan yang memperoleh sertifikat/ ijin edar (%)	80 unit	2	3	4	5
B. Peningkatan volume ekspor komoditi peternakan (%)	193.347	3	4	5	6
C. Peningkatan investasi subsektor peternakan (proyek)	69	70	70	70	70
D. Penguatan Kelembagaan dan Usaha (%)	-	24	39	30	22

f. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Untuk mendukung sasaran kinerja program, terdapat 5 (lima) target kinerja fungsi Sekretariat yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Kinerja fungsi sekretariat disajikan pada tabel berikut

Tabel. 6.8 IKSK Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) SEKRETARIAT	TARGET				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP (kategori)	A	A	A	A	A
B. Peningkatan kualitas pelayanan publik					
(1). Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja/IPNBK	A	A	A	A	A
(2). Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	A	A	A	A	A
C. Peningkatan Kualitas Aparatur					
(1). Pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik/sangat baik	95	95	95	95	95
D. Peningkatan penerapan Peraturan Perundang-undangan Bidang PKH (%)					
(1). Tindaklanjut amanat undang-undang (%)	10	11	12	13	14

3. Indikator Kerja

Untuk mencapai sasaran kinerja fungsi kegiatan mendukung terwujudnya sasaran program, diperlukan pilihan aktivitas kegiatan yang benar-benar prioritas untuk dilaksanakan. Penjabaran indikator kerja ke dalam aktivitas kegiatan prioritas diharapkan akan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja fungsi yang ditetapkan, sehingga output/outcome fungsi yang dihasilkan secara agregasi akan mengerakkan pencapaian sasaran program pembangunan setiap tahunnya. Target kerja kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.9 Rincian Target Kerja 2016-2019

No	Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Operasional	SATUAN	Target				Anggaran (Rp. Miliar)			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
I	MENINGKATNYA PRODUKSI MUTU DAN KEAMANAN PAKAN						510,02	800,43	874,00	980,00
	1. Pengembangan hijauan pakan ternak	ha	7.857	10.348	12.062	13.776	413,24	518,28	557,58	604,50
	2. Pengembangan pakan olahan dan bahan pakan	ton	5.792	14.365	16.555	18.242	72,16	206,70	248,60	300,30
	3. Pengembangan mutu dan keamanan pakan	sampel	11.166	7.850	8.100	8.350	24,62	75,45	67,83	75,20
II	MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN HEWAN						302.538	1.641,11	1.828,01	1.975,80
	1. Penanganan dan pengendalian PHMSZ (provinsi/kabupaten/pulau)	dosis	7.500.000	12.456.872	13.073.379	13.808.630	95,98	467,12	529,08	585,58
	2. Penanganan dan pengendalian penyakit Anthrax (provinsi/kabupaten/pulau)	dosis	178.300	301.455	316.528	332.354	5,00	117,49	124,56	132,03
	3. Penanganan dan pengendalian Rabies (provinsi/kabupaten/pulau)	dosis		1.496.660	1.571.493	1.728.642	42,80	116,94	131,72	134,97
	4. Penurunan angka kematian ternak	dokumen	120	120	120	120	118,60	920,72	1.022,28	1.101,13
	5. Peningkatan kesehatan hewan pemasukan dan pengeluaran	dokumen	120	120	120	120	2,70	9,42	10,18	11,04
	6. Peningkatan mutu dan kewan bahan pakan asal hewan	dokumen	34	35	38	40	1,60	1,43	1,55	1,72
	7. Peningkatan Volume ekspor obat hewan	dokumen	120	120	120	120	2,50	7,99	8,63	9,32
III	MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TERNAK						209,33	1.062,19	1.198,43	1.252,20
	1. Pengembangan populasi sapi dan kerbau	klpk/pkt	82	331	177	485	85,71	237,00	337,75	362,50
	2. Produksi benih sapi dan kerbau	dosis	5.045.800	5.045.800	5.192.800	5.440.800	87,267	115,50	118,73	119,39
	3. Pengembangan populasi kambing dan domba	klpk/paket	10	113	130	172	10,30	37,25	47,10	57,50
	4. Pengembangan populasi babi	klpk/paket	84	82	80	117	4,20	26,10	36,60	43,10
	5. Pengembangan populasi unggas dan aneka ternak	klpk/paket	20	307	352	163	4,00	71,17	79,70	88,12
	6. Peningkatan produktivitas ternak sapi dan kerbau	akseptor	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	17,850	449,17	452,55	455,59
	7. Penambahan indukan/pejantan sapi	ekor	-	1.000	1.000	1.000	-	126	126	126

No	Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Operasional	SATUAN	Target				Anggaran (Rp. Miliar)			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
IV	MENINGKATNYA MUTU DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN						205,20	346,00	397,10	445,20
	1. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan produk hewan yang ASUH	unit	398	373	526	695	190,10	292,2	326,4	357,1
	2. Penerapan kesejahteraan hewan	unit	90	90	123	150	10,30	38,0	50,7	64,8
	3. Pencegahan penularan zoonosis	unit	144	184	218	248	4,80	15,8	20,0	23,3
V	MENINGKATNYA NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK PETERNAKAN						75,52	100,58	115,67	133,02
	1. Peningkatan fasilitas UPH peternakan pangan dan non pangan	UPH	48	60	65	70	18,96	18,00	20,70	23,81
	2. Peningkatan fasilitas Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair	UPH	17	50	60	70	8,10	16,50	18,98	21,82
	3. Peningkatan volume ekspor komoditi peternakan	laporan	3	6	6	6	0,5	1,83	2,10	2,42
	4. Peningkatan investasi subsektor peternakan	Lokasi	19	24	26	28	3,78	4,95	5,69	6,55
	5. Perbaikan tataniaga peternakan	lokasi	94	150	198	249	23,47	31,55	36,28	41,72
	6. Peningkatan aksesibilitas pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan	kelompok	114	126	138	152	1,5	8,08	9,29	10,69
	7. Peningkatan aksesibilitas pelaku usaha terhadap asuransi ternak	Ekor	2.000	2.500	3.000	3.500	2,50	3,00	3,45	3,97
	8. Penguatan Kelembagaan Peternakan	kelompok	53	65	85	90	16,72	16,67	19,17	22,05
VI	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DITJEN PKH						291,84	368,63	385,45	403,71
	1. Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya	bulan	12	12	12	12	158,84	235,60	252,09	269,74
	2. Pelaksanaan SAKIP	dokumen	329	329	328	294	133,00	133,03	133,36	133,97

Untuk memastikan capaian kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berjenjang, dengan menggunakan instrumen pengukuran kinerja yang bisa dipertanggung jawabkan serta dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan. Untuk itu dalam rangka memberikan data dan informasi monitoring dan evaluasi yang obyektif, *reliable* sebagai dasar perbaikan penyusunan kebijakan berikutnya akan disusun instrumen Manual Indikator Kinerja sebagai alat ukur untuk melihat capaian sasaran kinerja baik program dan kegiatan setiap tahunnya. Pedoman manual indikator program dan kegiatan akan disusun secara terpisah, sebagai bagian dari Dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas. Dokumen Rencana Strategis tersebut merupakan panduan bagi pimpinan untuk menghasilkan rancangan program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan standar dan rencana kerja serta evaluasi selama tahun 2015-2019

Implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019 setiap tahun masih harus disusun dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dokumen tersebut, masih dimungkinkan mengalami penyesuaian berdasarkan kebutuhan menyesuaikan perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Menyadari bahwa pencapaian pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tidak mudah, maka hanya dengan tekad dan integritas para penyelenggara negara di Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, disertai dengan intensitas koordinasi dengan pelaksana pembangunan di daerah dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait, maka tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan akan dapat dicapai.

Lampiran 1. Sasaran Populasi Sapi Potong Tahun 2015 – 2019

(Ekor)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	536.930	433.245	445.573	459.208	474.356
2	Sumatera Utara	666.496	560.850	576.809	594.460	614.070
3	Sumatera Barat	400.256	350.130	360.093	371.112	383.354
4	Riau	242.205	188.028	193.378	199.295	205.870
5	Jambi	140.185	127.529	131.157	135.171	139.630
6	Sumatera Selatan	261.515	231.459	238.045	245.330	253.423
7	Bengkulu	115.593	113.627	116.860	120.436	124.409
8	Lampung	598.740	614.661	632.151	651.495	672.987
9	Kepulauan Bangka Belitung	11.121	8.790	9.040	9.317	9.624
10	Kepulauan Riau	18.534,00	18.725	19.258	19.848	20.502
11	DKI Jakarta	2.129,00	2.259	2.324	2.395	2.474
12	Jawa Barat	447.999	410.446	422.125	435.042	449.394
13	Jawa Tengah	1.628.093	1.607.788	1.653.536	1.704.136	1.760.352
14	DI. Yogyakarta	322.775	292.382	300.701	309.903	320.126
15	Jawa Timur	4.326.261	3.844.247	3.953.633	4.074.618	4.209.031
16	Banten	57.156	49.379	50.784	52.338	54.065
17	Bali	570.436	512.479	527.061	543.189	561.108
18	Nusa Tenggara Barat	1.046.772	695.535	715.326	737.216	761.535
19	Nusa Tenggara Timur	902.326	861.140	885.644	912.745	942.855
20	Kalimantan Barat	158.945	150.271	154.547	159.276	164.530
21	Kalimantan Tengah	70.879	55.648	57.231	58.983	60.929
22	Kalimantan Selatan	150.875	123.509	127.024	130.911	135.229
23	Kalimantan Timur	141.855	84.774	87.187	89.854	92.819
24	Kalimantan Utara	22.346	15.008	15.436	15.908	16.433
25	Sulawesi Utara	121.923	113.441	116.669	120.239	124.205
26	Sulawesi Tengah	272.470	267.929	275.553	283.985	293.353
27	Sulawesi Selatan	1.340.540	1.054.693	1.084.704	1.117.897	1.154.774
28	Sulawesi Tenggara	287.663	246.904	253.929	261.700	270.333
29	Gorontalo	194.593	187.413	192.746	198.644	205.197
30	Sulawesi Barat	85.561	87.950	90.453	93.221	96.296
31	Maluku	102.873	79.246	81.501	83.995	86.766
32	Maluku Utara	80.821	70.763	72.776	75.003	77.477
33	Papua Barat	67.287	51.617	53.086	54.710	56.515
34	Papua	100.135	85.288	87.715	90.399	93.381
Indonesia		15.494.288	13.597.154	13.984.055	14.411.979	14.887.400

Lampiran 2. Sasaran Populasi Sapi Perah Tahun 2015 – 2019

(Ekor)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	113	27	27	28	29
2	Sumatera Utara	1.147	2.020	2.080	2.152	2.242
3	Sumatera Barat	722	1.170	1.204	1.247	1.299
4	Riau	149	283	291	301	314
5	Jambi	72	68	70	72	75
6	Sumatera Selatan	130	344	354	367	382
7	Bengkulu	216	194	200	207	216
8	Lampung	280	285	293	303	316
9	Kepulauan Bangka Belitung	155	433	446	462	481
10	Kepulauan Riau	7	5	5	6	6
11	DKI Jakarta	2.820	2.854	2.938	3.041	3.168
12	Jawa Barat	135.345	110.314	113.586	117.559	122.467
13	Jawa Tengah	123.365	110.274	113.544	117.516	122.422
14	DI. Yogyakarta	4.504	4.596	4.732	4.898	5.102
15	Jawa Timur	253.830	236.826	243.850	252.380	262.916
16	Banten	37	33	34	35	37
17	Bali	107	151	155	161	167
18	Nusa Tenggara Barat	-	19	20	20	21
19	Nusa Tenggara Timur	46	41	43	44	46
20	Kalimantan Barat	51	180	185	191	199
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	220	166	171	177	184
23	Kalimantan Timur	81	30	31	32	33
24	Kalimantan Utara	2	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	99	113	116	120	125
26	Sulawesi Tengah	10	11	11	11	12
27	Sulawesi Selatan	1.624	1.498	1.542	1.596	1.663
28	Sulawesi Tenggara	12	-	-	-	-
29	Gorontalo	13	15	15	16	17
30	Sulawesi Barat	14	47	48	50	52
31	Maluku	-	1	1	1	1
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	-	5	5	6	6
Indonesia		525.171	472.000	486.000	503.000	524.000

Lampiran 3. Sasaran Populasi Kerbau Tahun 2015 – 2019

(Ekor)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	175.248	113.702	114.408	115.215	116.224
2	Sumatera Utara	117.200	95.436	96.029	96.707	97.553
3	Sumatera Barat	123.598	87.681	88.226	88.848	89.626
4	Riau	47.832	32.741	32.945	33.177	33.468
5	Jambi	44.531	41.799	42.059	42.355	42.726
6	Sumatera Selatan	36.499	26.727	26.893	27.083	27.320
7	Bengkulu	20.909	18.060	18.172	18.301	18.461
8	Lampung	22.860	22.981	23.124	23.287	23.491
9	Kepulauan Bangka Belitung	203	214	216	217	219
10	Kepulauan Riau	12	12	12	12	12
11	DKI Jakarta	257	206	207	209	211
12	Jawa Barat	117.313	109.998	110.681	111.462	112.438
13	Jawa Tengah	67.705	63.003	63.394	63.841	64.400
14	DI. Yogyakarta	1.015	995	1.002	1.009	1.017
15	Jawa Timur	28.520	28.567	28.745	28.947	29.201
16	Banten	104.031	100.255	100.877	101.589	102.479
17	Bali	1.580	2.011	2.023	2.038	2.056
18	Nusa Tenggara Barat	133.323	81.346	81.852	82.429	83.151
19	Nusa Tenggara Timur	139.208	135.205	136.045	137.005	138.204
20	Kalimantan Barat	3.378	2.254	2.268	2.284	2.304
21	Kalimantan Tengah	10.923	9.962	10.024	10.095	10.183
22	Kalimantan Selatan	27.301	22.025	22.162	22.319	22.514
23	Kalimantan Timur	6.137	3.993	4.017	4.046	4.081
24	Kalimantan Utara	4.036	3.195	3.215	3.238	3.266
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	3.229	3.462	3.484	3.508	3.539
27	Sulawesi Selatan	111.683	92.060	92.632	93.286	94.103
28	Sulawesi Tenggara	2.471	2.103	2.116	2.131	2.150
29	Gorontalo	20	16	16	16	17
30	Sulawesi Barat	7.663	7.584	7.631	7.685	7.752
31	Maluku	21.099	18.062	18.174	18.303	18.463
32	Maluku Utara	760	783	788	793	800
33	Papua Barat	-	1	1	1	1
34	Papua	787	558	561	565	570
Indonesia		1.381.331	1.127.000	1.134.000	1.142.000	1.152.000

Lampiran 4. Sasaran Populasi Kambing Tahun 2015 – 2019

(Ekor)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	610.677	733.855	761.923	791.090	821.391
2	Sumatera Utara	883.862	950.812	987.179	1.024.969	1.064.228
3	Sumatera Barat	274.717	287.323	298.313	309.732	321.596
4	Riau	199.479	196.805	204.332	212.154	220.280
5	Jambi	459.541	459.873	477.463	495.740	514.729
6	Sumatera Selatan	388.863	369.811	383.955	398.653	413.923
7	Bengkulu	340.874	294.441	305.702	317.405	329.562
8	Lampung	1.252.402	1.402.626	1.456.274	1.512.021	1.569.936
9	Kepulauan Bangka Belitung	2.917	3.610	3.748	3.891	4.040
10	Kepulauan Riau	21.495	24.129	25.052	26.011	27.008
11	DKI Jakarta	5.781	7.416	7.700	7.995	8.301
12	Jawa Barat	2.395.881	2.865.014	2.974.595	3.088.465	3.206.763
13	Jawa Tengah	3.997.917	4.389.986	4.557.894	4.732.374	4.913.638
14	DI. Yogyakarta	411.209	413.831	429.659	446.106	463.194
15	Jawa Timur	3.136.513	3.288.416	3.414.191	3.544.889	3.680.669
16	Banten	709.870	911.029	945.874	982.083	1.019.700
17	Bali	69.137	72.895	75.683	78.581	81.590
18	Nusa Tenggara Barat	623.654	653.825	678.832	704.819	731.815
19	Nusa Tenggara Timur	627.707	663.021	688.380	714.732	742.108
20	Kalimantan Barat	155.535	187.447	194.616	202.066	209.806
21	Kalimantan Tengah	42.572	48.647	50.508	52.441	54.450
22	Kalimantan Selatan	67.069	74.004	76.835	79.776	82.832
23	Kalimantan Timur	56.620	56.044	58.188	60.416	62.730
24	Kalimantan Utara	14.073	12.568	13.049	13.549	14.068
25	Sulawesi Utara	49.132	53.928	55.991	58.134	60.361
26	Sulawesi Tengah	658.553	632.451	656.641	681.778	707.892
27	Sulawesi Selatan	681.960	670.689	696.342	722.998	750.691
28	Sulawesi Tenggara	144.383	163.197	169.439	175.926	182.664
29	Gorontalo	85.505	93.473	97.048	100.763	104.623
30	Sulawesi Barat	220.766	245.967	255.375	265.151	275.307
31	Maluku	99.266	298.779	310.207	322.082	334.418
32	Maluku Utara	114.452	116.677	121.140	125.777	130.594
33	Papua Barat	27.365	24.953	25.908	26.899	27.930
34	Papua	49.849	39.456	40.965	42.533	44.162
Indonesia		18.879.596	20.707.000	21.499.000	22.322.000	23.177.000

Lampiran 5. Sasaran Populasi Domba Tahun 2015 – 2019

(Ekor)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	116.582	191.153	204.069	217.858	232.573
2	Sumatera Utara	620.919	724.552	773.507	825.774	881.551
3	Sumatera Barat	5.874	6.737	7.192	7.678	8.196
4	Riau	9.432	5.766	6.155	6.571	7.015
5	Jambi	82.329	93.868	100.210	106.982	114.208
6	Sumatera Selatan	34.221	33.765	36.047	38.482	41.082
7	Bengkulu	4.713	6.019	6.426	6.860	7.323
8	Lampung	73.194	108.290	115.607	123.419	131.755
9	Kepulauan Bangka Belitung	73	145	155	165	176
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	2.322	1.428	1.525	1.628	1.738
12	Jawa Barat	10.826.494	11.426.533	12.198.579	13.022.850	13.902.492
13	Jawa Tengah	2.458.619	2.990.962	3.193.049	3.408.807	3.639.058
14	DI. Yogyakarta	176.005	190.848	203.743	217.510	232.202
15	Jawa Timur	1.242.526	1.442.337	1.539.790	1.643.835	1.754.869
16	Banten	738.937	775.289	827.672	883.598	943.282
17	Bali	-	46	49	53	56
18	Nusa Tenggara Barat	26.303	37.912	40.473	43.208	46.127
19	Nusa Tenggara Timur	65.378	77.718	82.969	88.575	94.558
20	Kalimantan Barat	114	276	295	315	336
21	Kalimantan Tengah	2.259	2.848	3.041	3.246	3.465
22	Kalimantan Selatan	3.054	2.912	3.108	3.318	3.542
23	Kalimantan Timur	241	279	297	318	339
24	Kalimantan Utara	69	54	57	61	65
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	8.740	9.412	10.048	10.727	11.452
27	Sulawesi Selatan	623	645	688	735	785
28	Sulawesi Tenggara	-	27	29	31	33
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	10.086	30.109	32.143	34.315	36.633
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	206	58	62	67	71
34	Papua	18	13	14	15	16
Indonesia		16.509.331	18.160.000	19.387.000	20.697.000	22.095.000

Lampiran 6. Sasaran Populasi Babi Tahun 2015 – 2019

(Ekor)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	4.381	4.356	4.458	4.562	4.669
2	Sumatera Utara	1.159.027	1.048.854	1.073.417	1.098.494	1.124.214
3	Sumatera Barat	33.547	33.887	34.681	35.491	36.322
4	Riau	49.826	49.814	50.981	52.172	53.393
5	Jambi	40.128	64.492	66.003	67.545	69.126
6	Sumatera Selatan	30.146	27.112	27.747	28.395	29.060
7	Bengkulu	6.639	5.940	6.079	6.221	6.367
8	Lampung	47.559	46.631	47.723	48.838	49.982
9	Kepulauan Bangka Belitung	34.762	26.089	26.700	27.323	27.963
10	Kepulauan Riau	337.356	346.659	354.777	363.066	371.566
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	6.895	7.819	8.002	8.189	8.381
13	Jawa Tengah	139.700	170.269	174.257	178.328	182.503
14	DI. Yogyakarta	13.743	14.552	14.893	15.241	15.598
15	Jawa Timur	41.882	49.393	50.550	51.731	52.942
16	Banten	32.807	26.690	27.315	27.953	28.607
17	Bali	825.658	913.398	934.789	956.627	979.025
18	Nusa Tenggara Barat	58.957	59.601	60.996	62.421	63.883
19	Nusa Tenggara Timur	1.844.930	1.877.344	1.921.308	1.966.193	2.012.229
20	Kalimantan Barat	560.371	443.141	453.519	464.114	474.980
21	Kalimantan Tengah	205.027	207.795	212.662	217.630	222.725
22	Kalimantan Selatan	2.979	4.355	4.457	4.561	4.668
23	Kalimantan Timur	66.738	65.884	67.427	69.002	70.617
24	Kalimantan Utara	34.984	32.411	33.170	33.945	34.740
25	Sulawesi Utara	417.039	427.021	437.021	447.231	457.702
26	Sulawesi Tengah	213.298	234.686	240.181	245.793	251.547
27	Sulawesi Selatan	670.292	682.134	698.108	714.417	731.144
28	Sulawesi Tenggara	57.992	46.751	47.846	48.964	50.110
29	Gorontalo	8.178	6.645	6.801	6.960	7.123
30	Sulawesi Barat	129.503	137.053	140.262	143.539	146.900
31	Maluku	84.810	308.632	315.860	323.239	330.807
32	Maluku Utara	59.866	61.495	62.935	64.406	65.914
33	Papua Barat	102.006	104.576	107.025	109.525	112.090
34	Papua	722.768	620.518	635.050	649.886	665.102
Indonesia		8.043.794	8.156.000	8.347.000	8.542.000	8.742.000

Lampiran 7. Sasaran Populasi Ayam Buras Tahun 2015 – 2019

(Ekor)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	6.235.865	6.070.881	6.076.328	6.081.797	6.087.266
2	Sumatera Utara	14.190.165	15.587.076	15.601.061	15.615.102	15.629.144
3	Sumatera Barat	5.132.522	4.932.550	4.936.975	4.941.419	4.945.862
4	Riau	3.600.303	3.172.237	3.175.083	3.177.940	3.180.798
5	Jambi	12.551.551	11.550.982	11.561.346	11.571.752	11.582.157
6	Sumatera Selatan	6.974.467	5.289.913	5.294.659	5.299.424	5.304.190
7	Bengkulu	2.901.696	2.997.486	3.000.175	3.002.876	3.005.576
8	Lampung	10.944.090	10.953.917	10.963.745	10.973.612	10.983.480
9	Kepulauan Bangka Belitung	2.334.681	1.684.686	1.686.198	1.687.715	1.689.233
10	Kepulauan Riau	559.344	829.476	830.220	830.967	831.715
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	28.383.241	27.571.500	27.596.238	27.621.075	27.645.912
13	Jawa Tengah	42.471.433	39.419.254	39.454.622	39.490.131	39.525.641
14	DI. Yogyakarta	4.435.362	4.003.824	4.007.416	4.011.023	4.014.629
15	Jawa Timur	34.828.778	33.898.135	33.928.550	33.959.086	33.989.622
16	Banten	9.857.506	9.719.664	9.728.384	9.737.140	9.745.896
17	Bali	4.116.543	4.126.316	4.130.018	4.133.735	4.137.453
18	Nusa Tenggara Barat	7.290.185	5.500.939	5.505.875	5.510.830	5.515.786
19	Nusa Tenggara Timur	10.839.153	10.709.954	10.719.564	10.729.211	10.738.859
20	Kalimantan Barat	4.267.786	6.796.931	6.803.029	6.809.152	6.815.275
21	Kalimantan Tengah	2.873.600	3.175.760	3.178.609	3.181.470	3.184.330
22	Kalimantan Selatan	9.015.332	10.039.414	10.048.422	10.057.465	10.066.509
23	Kalimantan Timur	4.502.028	5.631.826	5.636.879	5.641.953	5.647.026
24	Kalimantan Utara	1.328.472	1.517.010	1.518.371	1.519.738	1.521.104
25	Sulawesi Utara	2.401.684	2.272.517	2.274.556	2.276.603	2.278.650
26	Sulawesi Tengah	5.481.845	4.957.986	4.962.434	4.966.901	4.971.367
27	Sulawesi Selatan	24.957.386	21.907.824	21.927.480	21.947.216	21.966.951
28	Sulawesi Tenggara	9.039.139	9.427.706	9.436.164	9.444.657	9.453.150
29	Gorontalo	1.850.163	1.377.891	1.379.127	1.380.368	1.381.610
30	Sulawesi Barat	4.593.907	4.612.351	4.616.490	4.620.645	4.624.800
31	Maluku	2.613.466	3.859.290	3.862.753	3.866.229	3.869.706
32	Maluku Utara	655.179	579.162	579.681	580.203	580.725
33	Papua Barat	1.906.231	1.401.107	1.402.365	1.403.627	1.404.889
34	Papua	1.887.863	1.947.435	1.949.182	1.950.936	1.952.691
	Indonesia	285.020.966	277.523.000	277.772.000	278.022.000	278.272.000

Lampiran 8. Sasaran Populasi Ayam Petelur Tahun 2015 – 2019

(Ekor)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	219.950	344.372	378.808	416.691	458.359
2	Sumatera Utara	14.962.637	22.230.978	24.454.001	26.899.487	29.589.393
3	Sumatera Barat	8.494.959	12.060.736	13.266.769	14.593.493	16.052.819
4	Riau	68.768	208.754	229.629	252.592	277.851
5	Jambi	567.529	926.333	1.018.963	1.120.863	1.232.947
6	Sumatera Selatan	6.793.055	9.289.696	10.218.635	11.240.534	12.364.570
7	Bengkulu	93.021	109.699	120.668	132.736	146.009
8	Lampung	6.085.893	7.249.406	7.974.322	8.771.782	9.648.947
9	Kepulauan Bangka Belitung	97.681	359.733	395.705	435.277	478.804
10	Kepulauan Riau	425.812	592.852	652.135	717.351	789.085
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	13.569.356	18.236.094	20.059.641	22.065.676	24.272.208
13	Jawa Tengah	20.565.694	30.619.585	33.681.440	37.049.702	40.754.613
14	DI. Yogyakarta	3.721.947	4.635.919	5.099.496	5.609.463	6.170.400
15	Jawa Timur	41.650.725	60.964.619	67.060.875	73.767.197	81.143.799
16	Banten	5.647.627	7.024.134	7.726.524	8.499.204	9.349.110
17	Bali	4.400.912	6.166.278	6.782.885	7.461.197	8.207.305
18	Nusa Tenggara Barat	419.819	284.715	313.185	344.505	378.955
19	Nusa Tenggara Timur	179.537	279.159	307.074	337.782	371.560
20	Kalimantan Barat	3.552.471	3.504.580	3.855.026	4.240.542	4.664.589
21	Kalimantan Tengah	145.329	57.898	63.688	70.056	77.062
22	Kalimantan Selatan	3.933.015	4.576.694	5.034.348	5.537.800	6.091.571
23	Kalimantan Timur	720.591	1.692.690	1.861.954	2.048.156	2.252.968
24	Kalimantan Utara	45.085	44.538	48.991	53.890	59.279
25	Sulawesi Utara	1.413.011	1.941.817	2.135.992	2.349.599	2.584.555
26	Sulawesi Tengah	1.228.783	1.257.624	1.383.382	1.521.725	1.673.895
27	Sulawesi Selatan	11.382.852	11.753.886	12.929.235	14.222.204	15.644.401
28	Sulawesi Tenggara	150.376	209.245	230.169	253.187	278.505
29	Gorontalo	373.655	458.060	503.865	554.253	609.678
30	Sulawesi Barat	102.537	145.549	160.103	176.114	193.725
31	Maluku	14.500	15.514	17.065	18.771	20.648
32	Maluku Utara	16.410	61.097	67.207	73.928	81.320
33	Papua Barat	66.862	79.653	87.618	96.380	106.018
34	Papua	308.601	175.095	192.604	211.865	233.051
Indonesia		151.419.000	207.557.000	228.312.000	251.144.000	276.258.000

Lampiran 9. Sasaran Populasi Ayam Pedaging Tahun 2015 – 2019

(Ekor)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	3.490.669	6.126.330	6.299.634	6.589.320	6.929.240
2	Sumatera Utara	47.659.709	92.793.671	95.418.664	99.806.436	104.955.116
3	Sumatera Barat	18.458.778	30.935.674	31.810.797	33.273.598	34.990.072
4	Riau	40.458.813	74.394.217	76.498.717	80.016.466	84.144.248
5	Jambi	13.186.178	21.952.618	22.573.624	23.611.659	24.829.706
6	Sumatera Selatan	25.027.014	47.116.645	48.449.504	50.677.426	53.291.705
7	Bengkulu	5.883.247	11.984.653	12.323.681	12.890.379	13.555.350
8	Lampung	32.771.775	60.294.461	62.000.100	64.851.139	68.196.593
9	Kepulauan Bangka Belitung	11.554.644	19.179.060	19.721.607	20.628.493	21.692.648
10	Kepulauan Riau	10.136.140	16.194.833	16.652.960	17.418.737	18.317.311
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	678.326.917	1.299.772.003	1.336.540.594	1.398.000.642	1.470.118.818
13	Jawa Tengah	109.911.641	209.430.042	215.354.502	225.257.454	236.877.733
14	DI. Yogyakarta	6.836.175	12.178.668	12.523.184	13.099.055	13.774.792
15	Jawa Timur	181.988.651	326.934.731	336.183.222	351.642.413	369.782.469
16	Banten	61.523.543	123.345.432	126.834.688	132.667.108	139.510.960
17	Bali	8.242.957	14.465.988	14.875.209	15.559.237	16.361.886
18	Nusa Tenggara Barat	11.854.763	10.113.161	10.399.247	10.877.450	11.438.581
19	Nusa Tenggara Timur	724.965	1.431.617	1.472.116	1.539.810	1.619.244
20	Kalimantan Barat	35.219.791	25.273.058	25.987.995	27.183.038	28.585.320
21	Kalimantan Tengah	7.539.337	9.855.001	10.133.784	10.599.780	11.146.588
22	Kalimantan Selatan	51.776.799	104.469.903	107.425.199	112.365.084	118.161.623
23	Kalimantan Timur	48.880.973	88.237.688	90.733.799	94.906.141	99.802.031
24	Kalimantan Utara	4.797.864	8.812.675	9.061.972	9.478.682	9.967.655
25	Sulawesi Utara	5.531.390	4.635.653	4.766.789	4.985.987	5.243.198
26	Sulawesi Tengah	10.270.439	17.923.488	18.430.516	19.278.033	20.272.522
27	Sulawesi Selatan	52.651.682	48.447.413	49.817.918	52.108.766	54.796.883
28	Sulawesi Tenggara	4.330.773	9.964.814	10.246.703	10.717.892	11.270.792
29	Gorontalo	1.902.755	1.275.714	1.311.802	1.372.125	1.442.908
30	Sulawesi Barat	1.856.372	3.727.344	3.832.785	4.009.033	4.215.846
31	Maluku	18.000	17.123	17.607	18.417	19.367
32	Maluku Utara	297.687	125.537	129.089	135.025	141.990
33	Papua Barat	1.355.022	1.301.046	1.337.850	1.399.371	1.471.559
34	Papua	3.160.195	5.072.636	5.216.134	5.455.994	5.737.451
Indonesia		1.497.625.658	2.707.782.894	2.784.381.990	2.912.420.189	3.062.662.203

Lampiran 10. Sasaran Populasi Itik Tahun 2015 – 2019

(Ekor)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	248.792	2.461.121	2.527.892	2.596.481	2.666.890
2	Sumatera Utara	2.446.864	2.613.629	2.684.537	2.757.377	2.832.148
3	Sumatera Barat	1.240.190	1.265.232	1.299.558	1.334.819	1.371.015
4	Riau	315.597	263.838	270.996	278.349	285.897
5	Jambi	1.435.092	1.374.198	1.411.480	1.449.778	1.489.091
6	Sumatera Selatan	1.669.363	1.230.585	1.263.971	1.298.266	1.333.471
7	Bengkulu	212.620	119.342	122.580	125.906	129.320
8	Lampung	464.681	660.528	678.449	696.857	715.754
9	Kepulauan Bangka Belitung	97.900	56.617	58.153	59.731	61.351
10	Kepulauan Riau	136.732	131.222	134.782	138.439	142.193
11	DKI Jakarta	22.495	26.127	26.835	27.564	28.311
12	Jawa Barat	9.345.143	8.983.420	9.227.142	9.477.504	9.734.503
13	Jawa Tengah	5.769.807	6.048.893	6.213.002	6.381.580	6.554.628
14	DI. Yogyakarta	543.973	568.767	584.198	600.049	616.320
15	Jawa Timur	4.336.427	4.565.613	4.689.479	4.816.720	4.947.334
16	Banten	2.175.276	2.217.129	2.277.280	2.339.070	2.402.498
17	Bali	642.528	676.486	694.840	713.693	733.046
18	Nusa Tenggara Barat	1.102.864	1.179.335	1.211.331	1.244.198	1.277.936
19	Nusa Tenggara Timur	329.869	327.351	336.232	345.355	354.720
20	Kalimantan Barat	568.872	669.102	687.255	705.902	725.044
21	Kalimantan Tengah	293.607	283.164	290.846	298.738	306.839
22	Kalimantan Selatan	4.192.672	4.758.778	4.887.886	5.020.509	5.156.649
23	Kalimantan Timur	203.163	165.907	170.408	175.031	179.778
24	Kalimantan Utara	38.673	74.764	76.792	78.876	81.015
25	Sulawesi Utara	164.375	166.163	170.671	175.302	180.056
26	Sulawesi Tengah	592.080	587.819	603.767	620.149	636.965
27	Sulawesi Selatan	4.609.795	4.278.619	4.394.700	4.513.942	4.636.345
28	Sulawesi Tenggara	274.334	439.488	451.412	463.660	476.233
29	Gorontalo	78.977	52.620	54.047	55.514	57.019
30	Sulawesi Barat	414.165	465.927	478.567	491.552	504.882
31	Maluku	484.654	497.986	511.497	525.375	539.622
32	Maluku Utara	67.473	57.666	59.230	60.837	62.487
33	Papua Barat	58.738	34.917	35.864	36.837	37.836
34	Papua	60.386	61.649	63.322	65.040	66.804
	Indonesia	44.638.177	47.364.000	48.649.000	49.969.000	51.324.000

Lampiran 11. Sasaran Produksi Daging Sapi Tahun 2015 – 2019

(000 Ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	10,66	9,57	10,44	11,38	12,41
2	Sumatera Utara	23,27	20,17	22,00	23,99	26,15
3	Sumatera Barat	25,98	25,27	27,57	30,06	32,77
4	Riau	9,74	9,02	9,84	10,73	11,69
5	Jambi	4,49	4,80	5,23	5,71	6,22
6	Sumatera Selatan	17,05	15,86	17,30	18,86	20,56
7	Bengkulu	3,45	4,62	5,04	5,49	5,99
8	Lampung	13,45	15,42	16,82	18,35	20,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,77	3,24	3,54	3,86	4,21
10	Kepulauan Riau	2,84	0,61	0,66	0,72	0,79
11	DKI Jakarta	20,64	19,71	21,51	23,45	25,56
12	Jawa Barat	73,44	78,63	85,78	93,54	101,96
13	Jawa Tengah	59,28	66,88	72,96	79,56	86,73
14	DI. Yogyakarta	8,87	9,45	10,31	11,24	12,25
15	Jawa Timur	100,17	110,16	120,18	131,05	142,85
16	Banten	38,95	40,12	43,77	47,73	52,02
17	Bali	7,34	9,80	10,70	11,66	12,71
18	Nusa Tenggara Barat	12,92	13,88	15,14	16,51	18,00
19	Nusa Tenggara Timur	12,15	12,12	13,23	14,42	15,72
20	Kalimantan Barat	7,64	8,84	9,64	10,51	11,46
21	Kalimantan Tengah	3,94	4,68	5,10	5,57	6,07
22	Kalimantan Selatan	8,52	10,69	11,66	12,71	13,86
23	Kalimantan Timur	9,14	9,39	10,24	11,17	12,17
24	Kalimantan Utara	0,71	0,69	0,75	0,82	0,89
25	Sulawesi Utara	4,62	4,99	5,45	5,94	6,47
26	Sulawesi Tengah	6,01	5,04	5,49	5,99	6,53
27	Sulawesi Selatan	16,22	15,88	17,33	18,89	20,59
28	Sulawesi Tenggara	4,45	4,21	4,59	5,01	5,46
29	Gorontalo	2,55	3,96	4,32	4,71	5,13
30	Sulawesi Barat	2,08	3,18	3,47	3,79	4,13
31	Maluku	2,17	2,94	3,21	3,50	3,81
32	Maluku Utara	0,85	0,96	1,05	1,14	1,24
33	Papua Barat	3,76	4,46	4,87	5,31	5,78
34	Papua	2,82	2,99	3,26	3,56	3,88
	Indonesia	523,93	552,20	602,43	656,91	716,06

Lampiran 12. Sasaran Produksi Daging Kerbau Tahun 2015 – 2019

(000 Ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	2,77	2,57	2,63	2,69	2,76
2	Sumatera Utara	4,18	3,26	3,34	3,41	3,50
3	Sumatera Barat	2,68	2,49	2,54	2,60	2,67
4	Riau	1,99	1,31	1,34	1,37	1,41
5	Jambi	2,16	2,70	2,76	2,82	2,89
6	Sumatera Selatan	1,13	0,78	0,80	0,82	0,84
7	Bengkulu	1,50	0,88	0,90	0,92	0,94
8	Lampung	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
10	Kepulauan Riau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DKI Jakarta	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
12	Jawa Barat	1,97	3,27	3,35	3,42	3,51
13	Jawa Tengah	2,33	2,17	2,22	2,27	2,32
14	DI. Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	0,15	0,12	0,12	0,12	0,12
16	Banten	1,93	7,26	7,42	7,59	7,78
17	Bali	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
18	Nusa Tenggara Barat	2,05	3,06	3,13	3,20	3,28
19	Nusa Tenggara Timur	1,39	1,24	1,27	1,30	1,33
20	Kalimantan Barat	0,05	0,07	0,08	0,08	0,08
21	Kalimantan Tengah	0,06	0,04	0,04	0,05	0,05
22	Kalimantan Selatan	0,72	0,79	0,81	0,83	0,85
23	Kalimantan Timur	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05
24	Kalimantan Utara	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
27	Sulawesi Selatan	3,62	3,28	3,35	3,43	3,52
28	Sulawesi Tenggara	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	0,19	0,14	0,14	0,15	0,15
31	Maluku	0,28	0,41	0,42	0,43	0,44
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06
	Indonesia	31,67	36,36	37,18	38,05	38,98

Lampiran 13. Sasaran Produksi Daging Kambing Tahun 2015 – 2019

(000 Ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	3.012	2,28	2,30	2,32	2,33
2	Sumatera Utara	3.693	3,55	3,58	3,61	3,64
3	Sumatera Barat	697	0,66	0,67	0,67	0,68
4	Riau	649	0,56	0,57	0,57	0,58
5	Jambi	740	0,74	0,74	0,75	0,76
6	Sumatera Selatan	1.753	2,27	2,29	2,31	2,33
7	Bengkulu	463	0,25	0,26	0,26	0,26
8	Lampung	2.037	2,52	2,54	2,56	2,58
9	Kepulauan Bangka Belitung	99	0,10	0,10	0,11	0,11
10	Kepulauan Riau	285	0,09	0,09	0,09	0,09
11	DKI Jakarta	1.419	1,29	1,30	1,31	1,32
12	Jawa Barat	6.135	7,33	7,39	7,44	7,50
13	Jawa Tengah	11.741	10,45	10,53	10,62	10,70
14	DI. Yogyakarta	1.510	1,53	1,54	1,55	1,56
15	Jawa Timur	17.037	15,87	15,99	16,11	16,24
16	Banten	2.625	3,32	3,35	3,37	3,40
17	Bali	1.786	1,72	1,73	1,75	1,76
18	Nusa Tenggara Barat	278	0,40	0,40	0,41	0,41
19	Nusa Tenggara Timur	3.827	3,72	3,75	3,77	3,80
20	Kalimantan Barat	290	0,53	0,53	0,53	0,54
21	Kalimantan Tengah	322	0,35	0,35	0,35	0,35
22	Kalimantan Selatan	567	0,68	0,68	0,69	0,69
23	Kalimantan Timur	559	0,39	0,39	0,39	0,40
24	Kalimantan Utara	37	0,03	0,03	0,03	0,03
25	Sulawesi Utara	398	0,40	0,41	0,41	0,41
26	Sulawesi Tengah	1.896	2,52	2,54	2,56	2,58
27	Sulawesi Selatan	1.024	1,63	1,64	1,65	1,67
28	Sulawesi Tenggara	129	0,27	0,27	0,28	0,28
29	Gorontalo	69	0,18	0,18	0,18	0,19
30	Sulawesi Barat	287	0,28	0,28	0,28	0,29
31	Maluku	98	0,46	0,46	0,47	0,47
32	Maluku Utara	21	0,04	0,04	0,04	0,04
33	Papua Barat	175	0,16	0,16	0,16	0,16
34	Papua	193	0,13	0,14	0,14	0,14
	Indonesia	65.851	66,71	67,23	67,75	68,28

Lampiran 14. Sasaran Produksi Daging Domba Tahun 2015 – 2019

(000 Ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	0,44	0,43	0,45	0,47	0,49
2	Sumatera Utara	1,99	2,24	2,33	2,43	2,52
3	Sumatera Barat	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Riau	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5	Jambi	0,14	0,18	0,19	0,20	0,20
6	Sumatera Selatan	0,22	0,40	0,42	0,44	0,46
7	Bengkulu	0,05	0,01	0,01	0,02	0,02
8	Lampung	0,06	0,09	0,10	0,10	0,10
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	0,21	0,51	0,53	0,55	0,57
12	Jawa Barat	19,43	26,49	27,55	28,65	29,80
13	Jawa Tengah	5,72	6,49	6,75	7,02	7,30
14	DI. Yogyakarta	2,18	2,65	2,76	2,87	2,98
15	Jawa Timur	5,93	6,47	6,73	7,00	7,28
16	Banten	4,13	3,69	3,83	3,99	4,15
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	0,00	0,02	0,02	0,02	0,03
19	Nusa Tenggara Timur	0,38	0,45	0,47	0,49	0,51
20	Kalimantan Barat	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kalimantan Tengah	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
22	Kalimantan Selatan	0,00	0,02	0,02	0,02	0,03
23	Kalimantan Timur	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
27	Sulawesi Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Sulawesi Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gorontalo	0,01	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	0,01	0,03	0,03	0,04	0,04
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-
	Indonesia	40,96	50,26	52,27	54,36	56,53

Lampiran 15. Sasaran Produksi Daging Babi Tahun 2015 – 2019

(000 Ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06
2	Sumatera Utara	41,38	46,61	49,38	52,30	55,41
3	Sumatera Barat	0,54	0,60	0,64	0,67	0,71
4	Riau	2,22	0,98	1,03	1,10	1,16
5	Jambi	0,95	0,26	0,28	0,29	0,31
6	Sumatera Selatan	0,39	0,67	0,71	0,76	0,80
7	Bengkulu	0,07	0,03	0,04	0,04	0,04
8	Lampung	0,84	0,69	0,73	0,78	0,82
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,76	0,80	0,85	0,90	0,95
10	Kepulauan Riau	18,48	20,29	21,49	22,77	24,12
11	DKI Jakarta	9,09	10,29	10,90	11,54	12,23
12	Jawa Barat	1,42	1,16	1,23	1,30	1,38
13	Jawa Tengah	1,25	1,99	2,11	2,23	2,37
14	DI. Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	3,24	3,73	3,95	4,18	4,43
16	Banten	0,83	1,21	1,28	1,36	1,44
17	Bali	132,86	146,47	155,16	164,36	174,11
18	Nusa Tenggara Barat	0,16	0,66	0,70	0,74	0,79
19	Nusa Tenggara Timur	34,17	38,30	40,57	42,97	45,52
20	Kalimantan Barat	29,27	31,31	33,16	35,13	37,21
21	Kalimantan Tengah	1,59	2,89	3,06	3,25	3,44
22	Kalimantan Selatan	0,06	0,16	0,17	0,18	0,19
23	Kalimantan Timur	1,11	1,33	1,41	1,49	1,58
24	Kalimantan Utara	0,51	0,47	0,49	0,52	0,55
25	Sulawesi Utara	20.692	22,75	24,10	25,53	27,05
26	Sulawesi Tengah	3,09	2,83	3,00	3,18	3,36
27	Sulawesi Selatan	4,17	4,68	4,96	5,25	5,56
28	Sulawesi Tenggara	0,28	0,62	0,66	0,70	0,74
29	Gorontalo	0,04	0,10	0,11	0,12	0,12
30	Sulawesi Barat	0,35	0,41	0,43	0,46	0,48
31	Maluku	0,40	3,33	3,52	3,73	3,96
32	Maluku Utara	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14
33	Papua Barat	1,54	1,50	1,59	1,69	1,79
34	Papua	7,24	7,45	7,89	8,36	8,85
	Indonesia	319,14	354,76	375,80	398,09	421,70

Lampiran 16. Sasaran Produksi Daging Ayam Buras Tahun 2015 – 2019

(000 Ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	13,07	13,13	13,28	13,43	13,59
2	Sumatera Utara	16,83	19,07	19,29	19,51	19,73
3	Sumatera Barat	6,29	6,24	6,31	6,38	6,45
4	Riau	4,20	3,42	3,46	3,49	3,53
5	Jambi	8,62	8,70	8,80	8,90	9,00
6	Sumatera Selatan	9,34	7,31	7,40	7,48	7,57
7	Bengkulu	0,43	0,50	0,50	0,51	0,51
8	Lampung	13,95	14,11	14,27	14,44	14,60
9	Kepulauan Bangka Belitung	2,02	1,31	1,32	1,34	1,35
10	Kepulauan Riau	0,60	0,92	0,93	0,94	0,95
11	DKI Jakarta	2,60	34,53	34,93	35,32	35,73
12	Jawa Barat	27,52	28,09	28,41	28,73	29,06
13	Jawa Tengah	45,32	45,59	46,11	46,64	47,17
14	DI. Yogyakarta	6,86	5,69	5,75	5,82	5,88
15	Jawa Timur	38,13	39,91	40,37	40,83	41,29
16	Banten	10,04	9,18	9,29	9,39	9,50
17	Bali	4,69	4,85	4,90	4,96	5,02
18	Nusa Tenggara Barat	7,86	6,12	6,19	6,26	6,33
19	Nusa Tenggara Timur	11,60	11,83	11,97	12,10	12,24
20	Kalimantan Barat	8,52	13,99	14,15	14,31	14,48
21	Kalimantan Tengah	2,18	2,20	2,22	2,25	2,27
22	Kalimantan Selatan	5,09	6,19	6,26	6,33	6,40
23	Kalimantan Timur	4,98	6,42	6,50	6,57	6,65
24	Kalimantan Utara	1,47	1,73	1,75	1,77	1,79
25	Sulawesi Utara	2,59	2,53	2,56	2,59	2,62
26	Sulawesi Tengah	9,45	8,82	8,92	9,02	9,13
27	Sulawesi Selatan	26,90	6,55	6,63	6,70	6,78
28	Sulawesi Tenggara	9,74	10,49	10,61	10,73	10,85
29	Gorontalo	2,04	1,57	1,58	1,60	1,62
30	Sulawesi Barat	4,95	5,13	5,19	5,25	5,31
31	Maluku	0,26	0,43	0,43	0,44	0,44
32	Maluku Utara	0,98	0,89	0,90	0,91	0,92
33	Papua Barat	1,39	1,06	1,07	1,08	1,09
34	Papua	3,51	2,17	2,19	2,22	2,24
	Indonesia	313,99	330,67	334,44	338,25	342,11

Lampiran 17. Sasaran Produksi Daging Ayam Petelur Tahun 2015 – 2019

(000 Ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	0,18	0,28	0,30	0,33	0,37
2	Sumatera Utara	10,55	15,60	17,16	18,87	20,76
3	Sumatera Barat	6.200	8,76	9,63	10,60	11,66
4	Riau	0,53	0,03	0,04	0,04	0,04
5	Jambi	0,73	0,89	0,98	1,08	1,19
6	Sumatera Selatan	4,93	6,71	7,38	8,12	8,93
7	Bengkulu	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05
8	Lampung	2,31	2,80	3,08	3,39	3,73
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,05	0,03	0,03	0,04	0,04
10	Kepulauan Riau	0,31	0,43	0,48	0,52	0,58
11	DKI Jakarta	1,34	0,76	0,84	0,92	1,01
12	Jawa Barat	7,46	10,58	11,64	12,80	14,08
13	Jawa Tengah	9,35	13,19	14,51	15,96	17,56
14	DI. Yogyakarta	3,41	3,66	4,03	4,43	4,87
15	Jawa Timur	24,21	26,13	28,74	31,62	34,78
16	Banten	3,98	3,03	3,33	3,66	4,03
17	Bali	2,40	3,34	3,67	4,04	4,45
18	Nusa Tenggara Barat	0,31	0,21	0,23	0,25	0,28
19	Nusa Tenggara Timur	0,03	0,05	0,05	0,06	0,06
20	Kalimantan Barat	3,58	3,52	3,87	4,25	4,68
21	Kalimantan Tengah	0,03	0,06	0,06	0,07	0,08
22	Kalimantan Selatan	2,51	2,15	2,37	2,61	2,87
23	Kalimantan Timur	0,33	0,76	0,84	0,92	1,01
24	Kalimantan Utara	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
25	Sulawesi Utara	0,86	1,18	1,30	1,43	1,57
26	Sulawesi Tengah	0,92	0,93	1,03	1,13	1,24
27	Sulawesi Selatan	8,34	2,66	2,93	3,22	3,54
28	Sulawesi Tenggara	0,11	0,15	0,17	0,18	0,20
29	Gorontalo	0,27	0,33	0,37	0,40	0,44
30	Sulawesi Barat	0,08	0,11	0,12	0,13	0,14
31	Maluku	-	0,01	0,01	0,01	0,01
32	Maluku Utara	0,01	0,05	0,06	0,06	0,07
33	Papua Barat	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09
34	Papua	0,23	0,13	0,14	0,15	0,17
	Indonesia	95,65	108,65	119,51	131,46	144,61

Lampiran 18. Sasaran Produksi Daging Ayam Pedaging Tahun 2015 – 2019

(000 Ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	4,64	7,37	7,57	7,92	8,33
2	Sumatera Utara	39,15	68,91	70,86	74,12	77,94
3	Sumatera Barat	20,08	30,42	31,28	32,72	34,41
4	Riau	41,94	77,51	79,70	83,37	87,67
5	Jambi	16,58	28,89	29,70	31,07	32,67
6	Sumatera Selatan	32,58	55,45	57,02	59,64	62,72
7	Bengkulu	1,87	3,79	3,89	4,07	4,28
8	Lampung	47,36	75,81	77,95	81,54	85,74
9	Kepulauan Bangka Belitung	18,39	25,85	26,58	27,80	29,24
10	Kepulauan Riau	9,19	13,28	13,66	14,28	15,02
11	DKI Jakarta	102,79	235,32	241,98	253,11	266,16
12	Jawa Barat	566,56	1.026,36	1.055,39	1.103,93	1.160,87
13	Jawa Tengah	132,56	225,34	231,72	242,37	254,88
14	DI. Yogyakarta	52,06	59,34	61,02	63,83	67,12
15	Jawa Timur	202,97	296,68	305,07	319,10	335,56
16	Banten	98,97	198,58	204,19	213,58	224,60
17	Bali	8,98	14,25	14,66	15,33	16,12
18	Nusa Tenggara Barat	10,75	8,29	8,53	8,92	9,38
19	Nusa Tenggara Timur	0,64	1,15	1,18	1,24	1,30
20	Kalimantan Barat	33,37	33,87	34,83	36,43	38,31
21	Kalimantan Tengah	11,31	13,37	13,74	14,38	15,12
22	Kalimantan Selatan	45,36	100,23	103,07	107,80	113,37
23	Kalimantan Timur	45,31	59,24	60,91	63,71	67,00
24	Kalimantan Utara	3,56	5,92	6,08	6,36	6,69
25	Sulawesi Utara	5,73	9,96	10,24	10,71	11,26
26	Sulawesi Tengah	9,40	14,70	15,11	15,81	16,62
27	Sulawesi Selatan	53,37	20,70	21,29	22,27	23,42
28	Sulawesi Tenggara	3,93	8,17	8,40	8,79	9,24
29	Gorontalo	1,74	1,05	1,08	1,13	1,19
30	Sulawesi Barat	1,68	3,06	3,14	3,29	3,46
31	Maluku	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
32	Maluku Utara	0,31	0,12	0,12	0,13	0,13
33	Papua Barat	1,10	0,96	0,98	1,03	1,08
34	Papua	2,87	4,16	4,28	4,47	4,70
	Indonesia	1.627,11	2.728,09	2.805,26	2.934,26	3.085,63

Lampiran 19. Sasaran Produksi Daging Itik Tahun 2015 – 2019

(000 Ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	1,62	1,82	1,95	2,09	2,24
2	Sumatera Utara	2,11	2,56	2,75	2,94	3,15
3	Sumatera Barat	0,73	0,84	0,91	0,97	1,04
4	Riau	0,30	0,25	0,27	0,29	0,31
5	Jambi	0,31	0,19	0,21	0,22	0,24
6	Sumatera Selatan	1,90	1,59	1,70	1,82	1,95
7	Bengkulu	0,06	0,04	0,04	0,04	0,05
8	Lampung	0,24	0,37	0,39	0,42	0,45
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,08	0,06	0,06	0,07	0,07
10	Kepulauan Riau	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11
11	DKI Jakarta	1,89	1,75	1,88	2,01	2,16
12	Jawa Barat	5,81	6,85	7,34	7,87	8,43
13	Jawa Tengah	3,72	4,18	4,48	4,80	5,14
14	DI. Yogyakarta	0,48	0,56	0,60	0,64	0,69
15	Jawa Timur	5,79	5,97	6,40	6,86	7,35
16	Banten	2,50	5,16	5,53	5,93	6,35
17	Bali	0,35	0,42	0,45	0,48	0,52
18	Nusa Tenggara Barat	0,69	0,84	0,90	0,96	1,03
19	Nusa Tenggara Timur	0,19	0,22	0,23	0,25	0,26
20	Kalimantan Barat	0,48	0,65	0,69	0,74	0,79
21	Kalimantan Tengah	0,16	0,18	0,19	0,20	0,22
22	Kalimantan Selatan	1,83	2,50	2,68	2,87	3,08
23	Kalimantan Timur	0,08	0,08	0,08	0,09	0,10
24	Kalimantan Utara	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
25	Sulawesi Utara	0,10	0,12	0,13	0,14	0,15
26	Sulawesi Tengah	0,37	0,42	0,45	0,48	0,52
27	Sulawesi Selatan	2,28	0,91	0,97	1,04	1,12
28	Sulawesi Tenggara	0,17	0,31	0,34	0,36	0,39
29	Gorontalo	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05
30	Sulawesi Barat	0,26	0,33	0,36	0,38	0,41
31	Maluku	0,07	0,09	0,10	0,11	0,12
32	Maluku Utara	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06
33	Papua Barat	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03
34	Papua	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
	Indonesia	34,85	39,53	42,37	45,40	48,65

Lampiran 20. Sasaran Produksi Telur Ayam Buras Tahun 2015 – 2019

(000 Ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	2,65	2,71	2,76	2,80	2,85
2	Sumatera Utara	11,60	13,37	13,60	13,83	14,07
3	Sumatera Barat	3,29	3,31	3,36	3,42	3,48
4	Riau	1,75	1,62	1,65	1,68	1,70
5	Jambi	5,88	5,71	5,81	5,91	6,01
6	Sumatera Selatan	4,33	3,44	3,50	3,56	3,62
7	Bengkulu	1,05	1,14	1,16	1,18	1,20
8	Lampung	10,60	9,44	9,60	9,77	9,94
9	Kepulauan Bangka Belitung	2,86	2,23	2,27	2,31	2,34
10	Kepulauan Riau	0,36	0,56	0,57	0,58	0,59
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	19,36	22,08	22,46	22,84	23,23
13	Jawa Tengah	35,13	38,37	39,03	39,70	40,38
14	DI. Yogyakarta	2,87	2,72	2,77	2,82	2,86
15	Jawa Timur	19,63	19,52	19,86	20,20	20,54
16	Banten	8,64	13,61	13,84	14,08	14,32
17	Bali	2,97	3,13	3,18	3,24	3,29
18	Nusa Tenggara Barat	4,66	3,69	3,75	3,82	3,88
19	Nusa Tenggara Timur	4,61	4,78	4,87	4,95	5,04
20	Kalimantan Barat	2,60	3,72	3,79	3,85	3,92
21	Kalimantan Tengah	2,44	2,83	2,88	2,93	2,98
22	Kalimantan Selatan	7,37	8,62	8,77	8,92	9,07
23	Kalimantan Timur	2,88	3,79	3,85	3,92	3,98
24	Kalimantan Utara	0,85	1,02	1,04	1,06	1,07
25	Sulawesi Utara	1,99	1,98	2,01	2,05	2,08
26	Sulawesi Tengah	3,55	3,37	3,43	3,49	3,55
27	Sulawesi Selatan	13,66	12,59	12,81	13,03	13,25
28	Sulawesi Tenggara	5,87	6,42	6,53	6,64	6,76
29	Gorontalo	1,37	1,07	1,09	1,11	1,13
30	Sulawesi Barat	2,98	3,13	3,19	3,24	3,30
31	Maluku	1,69	2,62	2,67	2,71	2,76
32	Maluku Utara	0,39	0,39	0,40	0,41	0,41
33	Papua Barat	0,66	0,51	0,51	0,52	0,53
34	Papua	1,22	1,32	1,35	1,37	1,39
Indonesia		191,77	204,82	208,34	211,92	215,56

Lampiran 21. Sasaran Produksi Telur Ayam Petelur Tahun 2015 – 2019

(000 Ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	1,99	5,19	5,47	5,61	5,79
2	Sumatera Utara	134,07	332,45	350,56	359,09	370,43
3	Sumatera Barat	64,48	155,20	163,65	167,63	172,93
4	Riau	1,03	5,24	5,52	5,66	5,84
5	Jambi	4,495	17,32	18,27	18,71	19,30
6	Sumatera Selatan	60,17	139,65	147,25	150,84	155,60
7	Bengkulu	0,64	1,25	1,32	1,35	1,39
8	Lampung	58,79	121,41	128,03	131,14	135,28
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,74	2,93	3,08	3,16	3,26
10	Kepulauan Riau	3,21	7,45	7,86	8,05	8,30
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	136,65	310,89	327,83	335,80	346,41
13	Jawa Tengah	194,71	482,82	509,13	521,51	537,99
14	DI. Yogyakarta	28,03	58,26	61,44	62,93	64,92
15	Jawa Timur	297,21	693,51	731,29	749,08	772,75
16	Banten	53,20	110,46	116,47	119,31	123,08
17	Bali	36,97	86,45	91,16	93,38	96,33
18	Nusa Tenggara Barat	3,24	3,66	3,86	3,96	4,08
19	Nusa Tenggara Timur	1,20	3,11	3,28	3,36	3,47
20	Kalimantan Barat	45,16	46,96	49,52	50,72	52,32
21	Kalimantan Tengah	1,82	0,67	0,71	0,73	0,75
22	Kalimantan Selatan	41,30	80,20	84,57	86,63	89,37
23	Kalimantan Timur	5,56	21,78	22,97	23,53	24,27
24	Kalimantan Utara	0,35	0,57	0,60	0,62	0,64
25	Sulawesi Utara	10,07	23,09	24,35	24,94	25,73
26	Sulawesi Tengah	9,25	15,81	16,67	17,07	17,61
27	Sulawesi Selatan	87,76	151,25	159,49	163,37	168,53
28	Sulawesi Tenggara	1,13	2,63	2,77	2,84	2,93
29	Gorontalo	2,81	5,76	6,07	6,22	6,41
30	Sulawesi Barat	0,77	1,83	1,93	1,98	2,04
31	Maluku	0,11	0,19	0,21	0,21	0,22
32	Maluku Utara	0,11	0,77	0,81	0,83	0,86
33	Papua Barat	0,93	1,85	1,95	2,00	2,06
34	Papua	2,33	2,20	2,32	2,38	2,45
	Indonesia	1,289,72	2.892,81	3.050,42	3.124,61	3.223,32

Lampiran 22. Sasaran Produksi Telur Itik Tahun 2015 – 2019

(000 Ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	9,89	10,11	10,50	10,90	11,32
2	Sumatera Utara	11,73	12,95	13,45	13,96	14,50
3	Sumatera Barat	6,81	7,18	7,45	7,74	8,04
4	Riau	2,29	1,97	2,05	2,13	2,21
5	Jambi	7,14	5,88	6,10	6,34	6,58
6	Sumatera Selatan	7,21	5,49	5,70	5,92	6,15
7	Bengkulu	0,87	0,50	0,52	0,54	0,56
8	Lampung	3,123	3,33	3,46	3,59	3,73
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,29	0,29	0,30	0,31	0,32
10	Kepulauan Riau	0,88	0,87	0,90	0,94	0,97
11	DKI Jakarta	0,16	0,19	0,19	0,20	0,21
12	Jawa Barat	54,55	60,84	63,18	65,61	68,13
13	Jawa Tengah	37,75	40,79	42,36	43,98	45,67
14	DI. Yogyakarta	3,49	3,77	3,91	4,07	4,22
15	Jawa Timur	32,77	29,77	30,92	32,11	33,34
16	Banten	16,15	17,31	17,98	18,67	19,38
17	Bali	4,01	4,36	4,53	4,71	4,89
18	Nusa Tenggara Barat	6,29	6,69	6,95	7,21	7,49
19	Nusa Tenggara Timur	1,56	1,59	1,66	1,72	1,79
20	Kalimantan Barat	2,99	3,65	3,79	3,93	4,08
21	Kalimantan Tengah	1,73	1,72	1,79	1,86	1,93
22	Kalimantan Selatan	28,74	33,71	35,01	36,35	37,75
23	Kalimantan Timur	1,12	0,94	0,98	1,01	1,05
24	Kalimantan Utara	0,21	0,42	0,44	0,46	0,47
25	Sulawesi Utara	0,96	1,10	1,15	1,19	1,24
26	Sulawesi Tengah	3,80	3,90	4,05	4,20	4,36
27	Sulawesi Selatan	28,01	26,86	27,90	28,97	30,08
28	Sulawesi Tenggara	1,76	2,91	3,02	3,14	3,26
29	Gorontalo	0,51	0,35	0,36	0,38	0,39
30	Sulawesi Barat	2,66	3,09	3,21	3,33	3,46
31	Maluku	2,07	2,20	2,29	2,37	2,46
32	Maluku Utara	0,41	0,38	0,40	0,41	0,43
33	Papua Barat	0,32	0,19	0,20	0,21	0,22
34	Papua	0,39	0,41	0,42	0,44	0,46
Indonesia		282,60	295,73	307,10	318,90	331,16

Lampiran 23. Sasaran Produksi Susu Tahun 2015 – 2019

(000 Ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	0,18	0,04	0,04	0,05	0,05
2	Sumatera Utara	0,83	1,48	1,58	1,71	1,85
3	Sumatera Barat	1,10	1,82	1,95	2,10	2,28
4	Riau	0,01	0,16	0,17	0,19	0,20
5	Jambi	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
6	Sumatera Selatan	0,01	0,35	0,38	0,40	0,44
7	Bengkulu	0,31	0,29	0,31	0,33	0,36
8	Lampung	0,22	0,23	0,25	0,27	0,29
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,00	0,65	0,69	0,75	0,81
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	5,53	5,69	6,09	6,56	7,12
12	Jawa Barat	260,82	276,31	295,73	318,57	345,42
13	Jawa Tengah	99,58	105,51	112,92	121,64	131,89
14	DI. Yogyakarta	6,63	5,31	5,68	6,12	6,64
15	Jawa Timur	426,56	450,25	481,90	519,11	562,86
16	Banten	0,00	0,08	0,08	0,09	0,10
17	Bali	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18
18	Nusa Tenggara Barat	-	0,03	0,03	0,03	0,04
19	Nusa Tenggara Timur	-	0,04	0,04	0,05	0,05
20	Kalimantan Barat	0,04	0,28	0,30	0,32	0,35
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	0,06	0,15	0,16	0,17	0,18
23	Kalimantan Timur	0,13	0,04	0,05	0,05	0,06
24	Kalimantan Utara	0,00	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	2,92	1,81	1,93	2,08	2,26
28	Sulawesi Tenggara	0,02	-	-	-	-
29	Gorontalo	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
30	Sulawesi Barat	0,02	0,07	0,07	0,08	0,09
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-
	Indonesia	805,36	850,77	910,57	980,88	1.063,56